



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024 - 2026



**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 - 2026 disusun berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025; Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Perangkat Daerah; Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 - 2026.

Sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 - 2026, serta untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur yang dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur, maka Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 - 2026 menjabarkan program – program prioritas bidang pertanian sesuai dengan Rencana Pembanguna Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis ini memuat gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, isu strategis, arah kebijakan, program dan Kegiatan serta berfungsi sebagai dasar pengukuran kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama 3 tahun kedepan..

Akhirnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis ini, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga/Jazakumullahu khairan katsira, dan semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat.

Selong, 2023

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Kabupaten Lombok Timur,



**Ir. H. MASYHUR, SP**  
NIP. 19661231 199203 1 150

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GRAFIK .....	iv
<b>BAB. I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB. II     GAMBARAN PELAYANAN SKPD</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.....	8
2.1.1. Tugas .....	8
2.1.2. Fungsi .....	8
2.2.3. Struktur Organisasi .....	9
2.2 Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur .....	30
2.2.1. Sumber Daya Manusia .....	30
2.2.2. Sarana dan Prasarana SKPD .....	31
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Renstra 5 Tahun sebelumnya .....	32
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	47
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>48</b>
3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Keswan .....	48
3.2. Isu – isu Strategis .....	48
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>54</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran .....	54
4.2. Cascading Tahun 2024 .....	55
<b>BAB V     STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	<b>58</b>
<b>BAB. VI    RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>62</b>
<b>BAB. VII    INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 – 2026 .....</b>	<b>64</b>
<b>BAB. VII    PENUTUP .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Keadaan PNS dan PPPK Menurut Golongan dan Jenis Jabatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023. .....	30
Tabel 2. Keadaan sarana lahan dan bangunan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018.....	31
Tabel 3. Pencapaian kinerja Sasaran Pelayanan Dinas Peternakandan Keswan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 – 2023.....	33
Tabel 4. Realisasi Kinerja PAD Tahun 2019 - 2022 .....	39
Tabel 5. Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 .....	40
Tabel 6. Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 Triwulan I – III .....	43
Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Keswan .....	54
Tabel 8. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan .....	58
Tabel 9. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan 2024 – 2026 .....	60

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Perkembangan Populasi Ternak 2018 - 2022 .....	35
Grafik 2. Perkembangan Populasi ternak Sapi 2018 – 2022 .....	36
Grafik 3. Jumlah Produksi Daging 2021 - 2022 .....	38

# BAB I P E N D A H U L U A N

## 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kegiatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah aspek perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (*stake holder*) di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu lingkungan wilayah/daerah selama jangka waktu tertentu.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah Tahun 2024-2026. Selanjutnya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026, arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan masing-masing instansi dilaksanakan dengan penetapan Arah kebijakan dan Program Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk jangka waktu lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 – 2026 merupakan Rencana Startegis Kedua Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur setelah terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Oraganisasi Perangkat Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Oragansasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sehingga terbentuklah Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.

Untuk mengaplikasikan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 - 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, maka diperlukan Rencana strategis masing – masing

organisasi perangkat daerah salah satunya adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pedoman pembangunan Peternakan di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 – 2026.

Rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur ini disusun selama periode 3 (Tiga) tahun yaitu sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dengan harapan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu kesatuan pola pikir serta pola tindakan untuk mencapai Lombok Timur yang lebih maju dan lebih sejahtera.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 4593)

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2006 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 31);
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 32);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur 2018 – 2023.
33. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 – 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud :**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 – 2026 dimaksudkan

untuk memberikan arah pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam 3 (tiga) tahun kedepan secara sistematis dan terencana terhadap langkah-langkah pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 - 2026 dalam bidang peternakan.

**Tujuan :**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan renstra ini dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan kendala yang akan dihadapi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan strategis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2024 – 2026;
- b. Menetapkan indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun kedepan sebagai dasar penilaian keberhasilan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.
- c. Menjabarkan kebijakan strategis bidang peternakan dan kesehatan hewan ke dalam program dan kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran yang akan dicapai;
- d. Merumuskan dan menjabarkan kerangka indikasi pembiayaan bidang peternakan dan kesehatan hewan 3 (tiga) tahun ke depan ke dalam indikasi pembiayaan tahunan secara rasional, professional, efisien dan efektif.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

##### **BAB. I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan truktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur

- 2.2 Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

**BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.1 Isu Strategis

**BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2 Cascading Kinerja PD

**BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB. VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB. VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LOMOK TIMUR**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur, maka Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

##### **2.1.1. Tugas**

Tugas yang diemban oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertanian dengan konsentrasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

##### **2.1.2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dengan konsentrasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dengan konsentrasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dengan konsentrasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pertanian dengan konsentrasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan Kerjasama di bidang pertanian dengan konsentrasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3. Struktur Organisasi**

Dalam pengelolaan tugas, wewenang, tanggungjawab dan fungsi Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Lombok Timur, maka telah tersusun sebuah struktur organisasi sebagai cerminan adanya tugas, wewenang, tanggungjawab dan fungsi yang diemban. Sehubungan dengan itu maka struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur mengacu kepada Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.

Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas, yang terdiri atas
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Peternakan, terdiri atas :
  - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas :
  - Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pengembangan Usaha Peternakan, terdiri atas :
  - Kelompok Jabatan Fungsional

#### **A. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur**

##### **1. Tugas**

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di

bidang pertanian dengan konsentrasi peternakan dan kesehatan hewan.

## 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dengan konsentrasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dengan konsentrasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dengan konsentrasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pertanian dengan konsentrasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan Kerjasama di bidang pertanian dengan konsentrasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas**

### 1. Tugas

Menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan, program dan anggaran serta ketatausahaan.

### 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas;
- d. pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **B.1. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas.**

#### 1. Tugas

Melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan hubungan Masyarakat dan informasi public, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha.

#### 2. Uraian Tugas

Dalam melakukan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan dan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;
- d. penyiapan dan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum;
- e. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas;
- f. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



## **B.2. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Kelompok Jabatan Fungsional (Subkoordinator Keuangan dan Pelaporan)**

### **1. Tugas**

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### **2. Uraian Tugas**

Dalam melakukan tugas, Subkoordinator Keuangan dan Pelaporan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Keuangan dan Pelaporan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- f. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- g. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- h. melakukan urusan gaji pegawai;
- i. melakukan administrasi keuangan;
- j. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;

- k. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- l. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- m. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- o. melakukan penyusunan laporan kinerja di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- p. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan dan Pelaporan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **C. Tugas dan Fungsi Bidang Peternakan**

### **1. Tugas**

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan.

### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, Prasarana dan sarana, pakan dan pengembangan teknologi di bidang peternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;

- e. pemberian bimbingan teknis penerapan teknologi peternakan;
- f. penyediaan prasarana dan sarana peternakan;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **C.1. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Kelompok Jabatan Fungsional (Subkoordinator Perbibitan dan Produksi)**

#### 1). Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit dan produksi peternakan.

#### 2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Subkoordinator perbibitan dan Produksi memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran perbibitan dan Produksi peternakan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang benih/bibit, dan produksi peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, ternak;
- d. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- e. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
- f. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- g. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan; dan

- h. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **C.2. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Kelompok Jabatan Fungsional (Subkoordinator Prasarana dan Sarana Peternakan)**

### 1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana peternakan.

### 2) Uraian Tugas Pekerjaan.

Dalam melakukan tugas, Subkoordinator Prasarana dan Sarana Peternakan memiliki uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:

- a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Prasarana dan sarana peternakan;
- b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan Prasarana dan sarana peternakan;
- c) melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan produksi, dan embung peternakan;
- d) melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan peternakan;
- e) melakukan penyediaan alat dan mesin peternakan;
- f) melakukan pengawasan peredaran penggunaan alat dan mesin peternakan;
- g) melakukan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan;
- h) penyebaran prototipe alat dan mesin peternakan;

- i) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan prasarana dan sarana peternakan ; dan
- j) melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **C.3. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Kelompok Jabatan Fungsional (Subkoordinator Pengembangan Teknologi Peternakan)**

#### 1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan teknologi peternakan.

#### 2) Uraian Tugas Pekerjaan.

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Pengembangan Teknologi Peternakan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang Pengembangan Teknologi Peternakan;
- c. melaksanakan bimbingan penggunaan teknologi produksi ternak dan penggunaan pakan dan bahan baku pakan ternak;
- d. melaksanakan bimbingan teknologi produksi benih hijauan pakan ternak;
- e. melaksanakan Bimbingan dan pelaksanaan Teknologi Inseminasi Buatan;
- f. melakukan Pemantauan pelaksanaan dan registrasi Inseminasi Buatan;
- g. melaksanakan Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri;
- h. produksi mani beku ternak local (local spesifik untuk

kabupaten);

- i. melakukan Bimbingan dan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan redistribusi hasil mudigah;
- j. membimbing pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi dibidang peternakan;
- k. Melaksanakan registrasi, tabulasi dan rekapitulasi data-data statistik mengenai potensi dan pemanfaatan teknologi peternakan;
- l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Pengembangan Teknologi Peternakan ; dan
- m. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- n. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- o. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibitHPT;
- p. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **D. Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

##### **1. Tugas**

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

##### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. pelaksanaan urusan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan urusan kesejahteraan hewan;
- c. pelaksanaan usaha pengamatan dan penelitian/penyidikan penyakit hewan;
- d. pelaksanaan urusan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. pelaksanaan usaha pelayanan kesehatan hewan;
- f. pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**D.1. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Kelompok Jabatan Fungsional (Subkoordinator Kesehatan Hewan), meliputi:**

1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan;

2) Uraian Tugas Pekerjaan.

Dalam melakukan tugas, Subkoordinator Kesehatan Hewan memiliki uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:

- a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi pelayanan kesehatan hewan;
- b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- c) melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- d) melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- e) melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;

- f) melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- g) melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- h) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan pelayanan kesehatan hewan; dan
- i) melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

## **D.2. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Kelompok Jabatan Fungsional (Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner)**

### 1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner;

### 2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat veteriner;
- c) melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- d) melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- e) melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;



- f) melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- g) melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- h) melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- i) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner;
- j) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- k) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

### **D.3. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Kelompok Jabatan Fungsional (Subkoordinator Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan)**

#### **1) Tugas**

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pencegahan dan Pemberantasan penyakit hewan;

#### **2) Uraian Tugas Pekerjaan**

Dalam melakukan tugas, Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;

- c) melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- d) melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- e) Melaksanakan pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan;
- f) Melaksanakan penyidikan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, Virus dan penyakit hewan lainnya;
- g) Melaksanakan bimbingan pengendalian penyakit hewan;
- h) Melaksanakan identifikasi dan pembuatan peta penyakit hewan;
- i) Melaksanakan pemeriksaan laboratorium penyakit hewan;
- j) Melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan;
- k) Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian penyakit ;
- l) Melakukan tindakan hygiens;
- m) Melaksanakan kembali pembukaan dan penutupan dan pembukaan wilayah wabah;
- n) Melaksanakan pengasingan hewan sakit atau tersangka sakit;
- o) Melakukan analisis dan penanggulangan residu bahan kimia komoditi peternakan;
- p) Melaksanakan registrasi dan tabulasi dan rekapitulasi data-data statistik mengenai potensi wilayah, target dan realisasi pencegahan, pemberantasan penyakit hewan;
- q) melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **E. Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Usaha Peternakan**

### **1. Tugas**

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan usaha peternakan.

### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Bidang pengembangan usaha peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang pengembangan usaha peternakan;
- b. pelaksanaan urusan pengawasan usaha peternakan;
- c. pelayanan usaha peternakan;
- d. bimbingan usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- e. bimbingan penerapan standar teknis bimbingan dan pengolahan hasil, pemasaran, pelayanan dan rekomendasi perijinan usaha;
- f. pelaksanaan ijin pengeluaran ternak / pemasukan ternak ke daerah / pengeluaran ternak keluar propinsi;
- g. Pengawasan lalulintas bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak dari atau ke wilayah daerah;
- h. Pelayanan promosi komoditas peternakan;
- i. Pengawasan pemeriksaan lalu lintas bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak dari atau ke wilayah daerah;
- j. Pemantauan dan pengawasan operasional pasar ternak;
- k. Pelaksanaan bimbingan analisa usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- l. pelaksanaan registrasi dan tabulasi dan rekapitulasi data-data statistik mengenai potensi wilayah, target dan realisasi pencapaian usaha peternakan;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**E.1. Tugas dan Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional (Subkoordinator Pelayanan Usaha), meliputi:**

1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pelayanan usaha peternakan.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Pelayanan usaha peternakan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi pelayanan usaha peternakan;
- b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang usaha Peternakan;
- c) melakukan penyiapan bahan bimbingan, penguatan dan fasilitasi pelayanan usaha peternakan;
- d) melaksanakan pengawasan usaha peternakan;
- e) melakukan pengawasan lalulintas ternak, bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak dari atau ke wilayah daerah;
- f) penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan
- g) melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pengawasan operasional pasar ternak;
- h) Melaksanakan registrasi dan tabulasi serta rekapitulasi data-data statistik mengenai potensi wilayah, target dan realisasi pencapaian usaha peternakan;
- i) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pelayanan usaha peternakan; dan
- j) melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **E.2. Tugas dan Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional (Subkoordinator Pengolahan Hasil Peternakan), meliputi:**

### 1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengolahan Hasil Peternakan.

### 2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Pengolahan Hasil Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan Hasil Peternakan;
- b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pengolahan Hasil Peternakan;
- c) melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
- d) melakukan penyusunan dan pengelolaan database usaha pengolahan hasil peternakan;
- e) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan;
- f) melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan;
- g) melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan hasil di bidang peternakan;
- h) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil di bidang peternakan;
- i) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan Hasil Peternakan;
- j) melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**E.3. Tugas dan Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional (Subkoordinator Pemasaran Hasil Peternakan), meliputi:**

1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pemasaran Hasil Peternakan.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Pemasaran Hasil Peternakan memiliki uraian tugas pekerjaan, sebagai berikut:

- a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan;
- b) melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pemasaran hasil di bidang peternakan;
- c) melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan;
- d) melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pengawasan operasional pasar ternak;
- e) melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan;
- f) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- g) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemasaran Hasil Peternakan;
- h) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

**F. Kelompok Jabatan Fungsional**

**1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional:**

- a. Penyuluh Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- b. Pengawas Bibit Ternak;
- c. Pengawas Mutu Pakan;
- d. Medik Veteriner;
- e. Paramedik Veteriner;
- f. Pengawas Mutu Hasil Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. Analis Pasar Hasil Peternakan dan Kesehatan Hewan.

**2. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:**

- a. Jabatan fungsional Penyuluh Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas antara lain:
  - 1) melakukan penyusunan program penyuluhan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - 2) melakukan Program dan Evaluasi dan penerapan metode penyuluhan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - 3) pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - 4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak mempunyai tugas antara lain:
  - 1) melakukan pengawasan proses produksi benih/bibit ternak;
  - 2) melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak;
  - 3) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan mempunyai tugas antara lain:
  - 1) melakukan pengawasan peredaran dan pengujian mutu pakan;
  - 2) melakukan pengembangan sistem dan metode pengujian dan pengawasan mutu pakan;

- 3) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Jabatan fungsional Medik Veteriner mempunyai tugas antara lain:
- 1) melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan;
  - 2) melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan masyarakat veteriner;
  - 3) melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
  - 4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Jabatan fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugas antara lain:
- 1) melakukan pengendalian hama dan penyakit hewandibawah penyeliaan Medik Veteriner;
  - 2) melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan masyarakat veteriner dibawah penyeliaan Medik Veteriner;
  - 3) melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner;
  - 4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas antara lain:
- 1) melakukan pengawasan mutu hasil Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - 2) melakukan pengujian mutu hasil Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - 3) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.



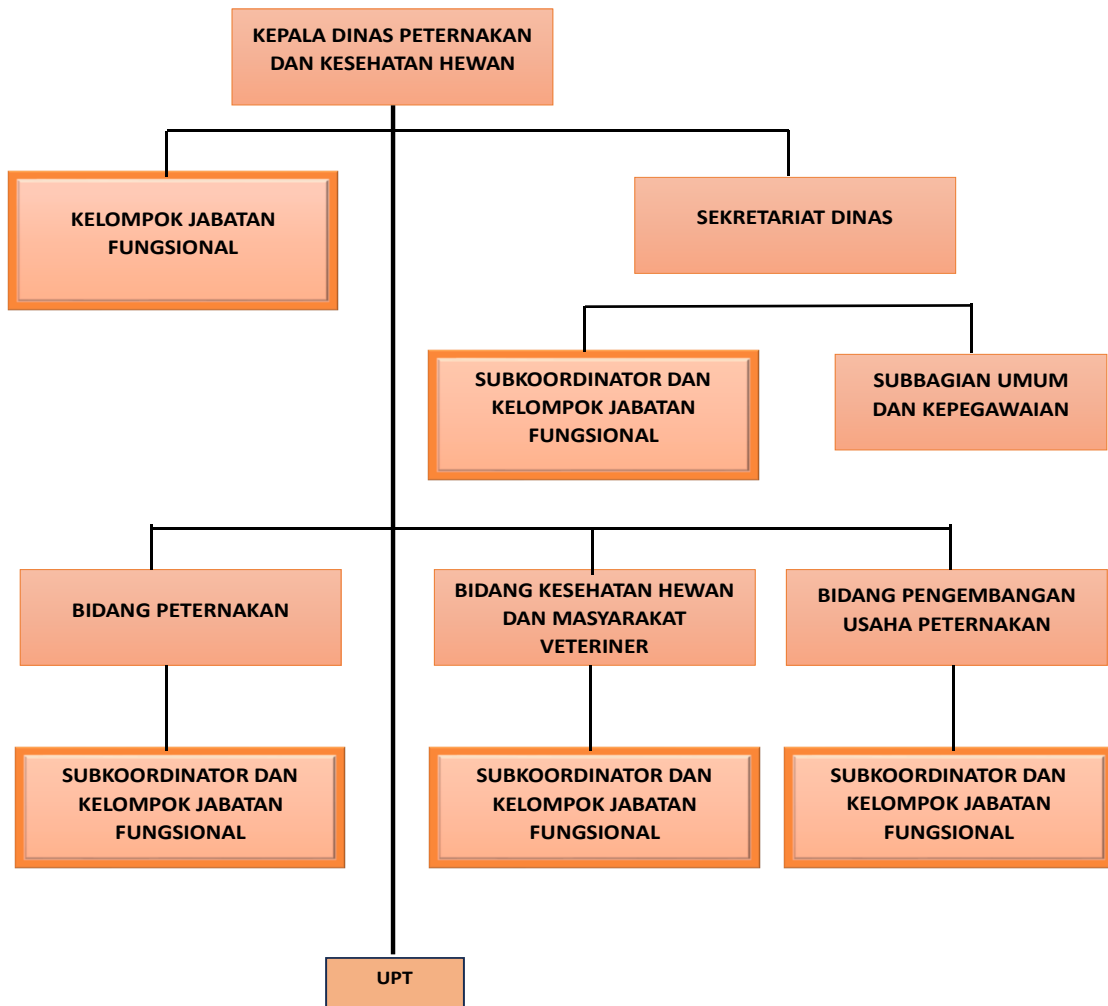
g. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas antara lain:

- 1) melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;
- 2) melakukan analisis data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;
- 3) melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;
- 4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi  
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Kabupaten Lombok Timur

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 25 TAHUN 2022

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



## 2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung agar pelaksanaan tugas, wewenang, tanggungjawab dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur memerlukan ketersediaan aparat / sumberdaya manusia yang berkualitas dengan kompetensi yang tepat dan dalam jumlah yang memadai.

Berdasarkan data yang ada diketahui, bahwa jumlah aparatur/pegawai pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur kondisi bulan September Tahun 2023 tercatat 331 orang yang terdiri atas 65 orang PNS (19,64%), PPPK 35 orang (10,57%) dan Non PNS 231 orang (69,79 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Keadaan PNS dan PPPK Menurut Golongan dan Jenis Jabatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023.

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan		Pangkat/ Golongan		Pejabat Struktural	
<b>331 orang</b>						
	- SD/S LTP	1 orang	Juru Muda Tk. I (I/d)	1 orang	Eselon II/b	1 Orang
	SLTA	67 orang	Pengatur Muda (II/d)	4 orang	Eselon III/a	1 Orang
	- DIII	64 orang	Penata Muda (III/a)	6 orang	Eselon III/b	3 orang
	- S1	196 orang	Penata Muda Tk. I (III/b)	6 orang	Subkoordinator	10 orang
	- S2	2 orang	Penata (III/c)	24 orang	Kepala UPT	15 orang
			Penata Tk. I (III/d)	18 orang	Eselon IV.b	15 orang
			Pembina (IV/a)	4 orang		
			Pembina Muda Tk. I(IV/b)	2 orang	<b>Pejabat fungsional</b>	
			<b>PPPK</b>		Pengawas Bibit Ternak	11 Orang
			Golongan VIII	22 orang	Medik Veteriner	1 Orang
			Golongan IX	6 orang		
			Golongan X	7 orang		

Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan 2023

Dari tabel 1. tersebut diatas diketahui bahwa dari 65 orang PNS yang ada pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur sebagian besar terdiri atas pegawai golongan III : 53 orang ( 81,54%) dan pegawai golongan IV : 6 orang (9,24% ), selebihnya 4 orang (6,15%) golongan II dan 1 orang (1,54 %) golongan I. Sedangkan untuk PPPK dari 35 orang sebagian besar terdiri atas Golongan VIII sebanyak 22 orang (62,86%), Golongan X : 7 orang (20%) dan Golongan IX sebanyak 6 orang (17,14%).

Apabila ditinjau dari jabatannya, maka dari 65 orang PNS tersebut yang mempunyai jabatan Struktural 45 orang (69,23%) dan 20 orang (30,77%) sebagai staf.

#### 2.2.2. Sarana dan Prasarana OPD

Untuk membantu pelaksanaan tugas, wewenang, tanggungjawab dan fungsinya, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung. Untuk mengetahui lebih jauh sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2 : Keadaan sarana lahan dan bangunan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023

No.	Lokasi / Institusi	Sawah (m2)	Ladang (m2)	Pekarangan (m2)	Bangunan(m2)	Jumlah (m2)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kantor Dinas Peternakan dan Keswan, Jl. Dr.Cipto Mangun Kusumo Selong.	-	-	100	50	150
2.	Pasar Ternak Masbagik					
	- Baru	-	-	17.600	341	17.941
3	Pasar Kambing Aikmel	-	-	408	50	458
4.	Pasar Kambing Jerowaru					
5.	Kantor KCD (eks Rumah Dokter)	-	-	524	88	612
6.	Kantor Inseminasi Buatan					900
	- Sukadana	-	-	2.770	15	2.785
	- Aikmel	-	-	2.760	20	2.780
	- Masbagik	-	-	2.880	60	2.940
	- Sakra	-	-	2.940	30	2.970
	- Keruak	-	-	2.940	30	2.970
	- Lepak	-	-	228	36	264
	- Suralaga	-	-	1000	200	1200
	- Wanasaba	-	-	339	161	500

No.	Lokasi / Institusi	Sawah (m <sup>2</sup> )	Ladang (m <sup>2</sup> )	Pekarangan (m <sup>2</sup> )	Bangunan(m <sup>2</sup> )	Jumlah (m <sup>2</sup> )
1	2	3	4	5	6	7
	- Pringgasele	-	-	339	161	500
	- Selong					
7.	Rumah Potong Hewan :					
	- RPH Pancor	-	-	-	-	-
	- RPH Sekarteja	-	-	140	30	170
	- RPH Rumbuk	-	-	160	70	230
	- RPH Masbagik	-	-	108	96	204
	- RPH Anjani	-	-	146	27	173
	- RPH Kotaraja	-	-	208	96	304
	- RPH Aikmel	-	-	1.008	96	1.104
	- RPH Apitaik	-	-	900	150	1050
8.	Pusat Kesehatan Hewan					
	- Selong	9.406	-	-	296	9.702
	- Masbagik	-	-	160	70	230
	- Sikur	-	-	382	59	441
	- Terara	-	-	2.660	70	2.730
	- Sakra	-	-	760	70	830
	- Keruak	-	-	760	70	830
	- Pringgabaya	-	-	1.060	70	1.130
	- Aikmel	-	-	360	70	430
	- Sambelia	-	-	58	72	130
	- Sukamulia	-	-	360	70	430
	- Sakra Timur	-	-	400	200	600
	- Sembalun	-	-	472	128	600
	- Montong Gading	-	-	340	160	500
	- Pringgasele					
	- Wanasaba					
	- Jerowaru					
	- Suela					
	- Suralaga					

Sumber ; disnakkeswan 2023

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Renstra 5 Tahun sebelumnya.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir sesuai dengan yang diamanatkan dalam RPJMD 2014 – 2018 serta Dokumen rencana strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur periode 2018 – 2023 telah menetapkan beberapa indikator kinerja pelayanan dan hal tersebut telah dilaksanakan dengan berbagai tantangan dan kemajuan yang dihadapi sebagaimana yang tertera dalam tabel 3. Berikut ini :

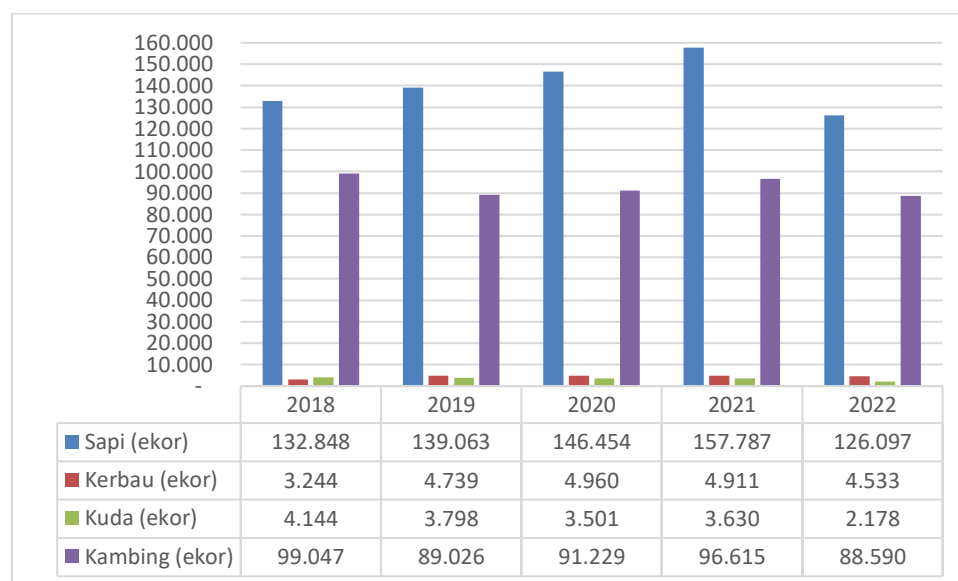
Tabel 3. Pencapaian kinerja Sasaran Pelayanan Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 – 2023

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET RENSTRA DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN TAHUN					REALISASI RENSTRA DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1.	Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan mutu komoditi Peternakan	Persentase PDRB Sub Sektor Peternakan			10.75	10.80	-	-	-	10,83	27,6	-	-	-	100,74	254,14	-	-	-
2.			Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta daya saing komoditi peternakan	Jumlah Populasi Ternak (Unit Ternak)	158.587	160.654		162.995	168.802	216.317,67	223.860	221.320	221.320	-	136,40	139,34	135,78	133,63	-
<b>Setelah Perubahan 2021 - 2023</b>																			
3.	Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan mutu komoditi Peternakan	-	Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta daya saing komoditi peternakan	Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan Unggulan Daerah (Ton)	-	-	19.343,60	20.117,40	20.922,00	-	-	20.038,95	16.014,3	-	-	-	103,59	79,60	-

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ada 2 (du) sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur yang harus dicapai selama kurun waktu lima tahun 2018 – 2023 dengan 2 (dua) indikator kinerja. Pada Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan tahun terakhir dari Rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.

Pada Indikator Kinerja Utama dengan Tujuan Meningkatkan Produksi ,Produktivitas dan mutu Komoditi Peternakan dengan Indikator Kinerja Peningkatan populasi ternak tahun 2020 dari target 160.654 Unit Ternak dapat terealisasi sebanyak 223.860 Unit Ternak atau 139,34% lebih tinggi dari tahun 2019 yakni terjadi peningkatatan sebanyak 2,94%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk beternak dan adanya pendistribusian ternak melalui kegiatan POKIR anggota DPRD. Akan tetapi, pada tahun 2022 terjadi penurunan populasi ternak dimana yang ditargetkan sebesar 165.622 Unit Ternak terealisasi sebesar 164.934,5 Unit Ternak atau 99,58 %. Hal ini lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 221.320 Unit Ternak ( 135,78 %) dari target sebesar 162.995 Unit Ternak. Tidak tercapainya target populasi ternak ini disebabkan telah terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak berkuku dua yaitu Sapi, Kerbau dan kambing. Populasi ternak Sapi pada tahun 2021 sebesar 157.787 ekor sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar 126.097 ekor atau menurun sebesar 20,08 %. Demikian juga dengan ternak kerbau terjadi penurunan populasi sebesar 7,70 % yaitu dari 4.911 ekor pada tahun 2021 menjadi 4.533 ekor tahun 2022 dan ternak kambing dari 96.615 ekor menjadi 88.590 ekor atau turun 8,31 %. adapun perkembangan populasi ternak disajikan dalam grafik dibawah ini :

Grafik.1. Perkembangan Populasi Ternak 2018-2023



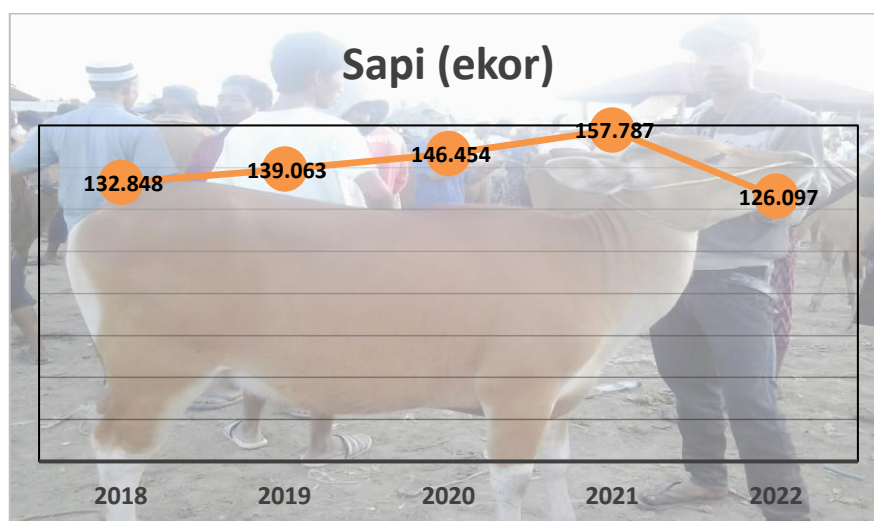
Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab . Lotim (2023)

Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu sentra peternakan di NTB bahkan menjadi kawasan peternakan Sapi Potong Nasional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Kpts/PD.410/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Domba, Sapi Perah dan Babi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Kawasan Pertanian Nasional. Kabupaten Lombok Timur berada pada urutan ke 4 populasi ternak sapi di NTB dengan tingkat pertumbuhan 2,99 persen dan masih berada diatas rata – rata pertumbuhan populasi ternak NTB yaitu sebesar 2,00 persen.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 sebagaimana telah dirubah dengan Permentan Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian dan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dimana Kabupaten Lombok Timur ditetapkan sebagai sentra kawasan pengembangan ternak sapi potong, hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Lombok Timur telah mampu memberikan andil secara nasional terhadap komoditi – komoditi strategis tersebut.



Grafik.2. Perkembangan Populasi Ternak Sapi 2018 - 2022



Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan Lotim (2023)

Pada sasaran Pelayanan kesehatan Hewan di Kabupaten Lombok Timur dapat digambarkan bahwa tingkat pelayanan penanganan kesehatan hewan baik melalui pelayanan aktif, semi aktif maupun pasif cukup memuaskan dengan capaian 17.125 ekor (112,72%) dari target sebesar 15.192 ekor. Demikian juga dengan pelayanan vaksinasi ternak baik yang dilakukan secara aktif oleh petugas maupun secara swadaya oleh peternakan telah berjalan dengan baik yaitu mencapai 1.975 % terutama vaksinasi terhadap ternak unggas. Hal ini memberikan kesan positif terhadap perkembangan perunggasan di Kabupaten Lombok Timur sehingga dengan semakin tingginya tingkat pelayanan kesehatan ternak maka menjadi indikator semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan ternak dan semakin sadarnya masyarakat terhadap nilai ekonomi ternak yang dipelihara.

Bahwa situasi umum penyakit hewan di Kabupaten Lombok Timur aman dan terkendali dalam arti sampai dengan tahun 2021 Kabupaten Lombok Timur telah terbebas dari penyakit hewan menular strategis seperti rabies, anthrax, brucellosis, avian influenza/flu burung dan hog kolerapenyakit mulut dan kuku, hal ini menjadi indikator keberhasilan pembangunan peternakan Kabupaten Lombok Timur. Akan tetapi, pada tahun 2022 ternak di Kabupaten Lombok Timur terserang Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Adapaun ternak yang terjangkit yakni ternak berkuku belah seperti sapi, kerbau dan kambing. Akibat

dari penyakit PMK ini yakni banyak ternak yang sakit dan mati sehingga menyebabkan terjadinya penurunan populasi ternak. Untuk mengantisipasi terjadinya penularan yang semakin luas telah dilakukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini Dinas Peternakan dan Keswan Kab. Lombok Timur. Adapun langkah – langkah yang dilakukan yakni pembatasan keluar masuk ternak, penutupan pasar hewan, desinfeksi, pengobatan dan pemberian vaksin. Dengan upaya semua pihak penyakit PMK dapat diatasi dan ditekan penyebarannya.

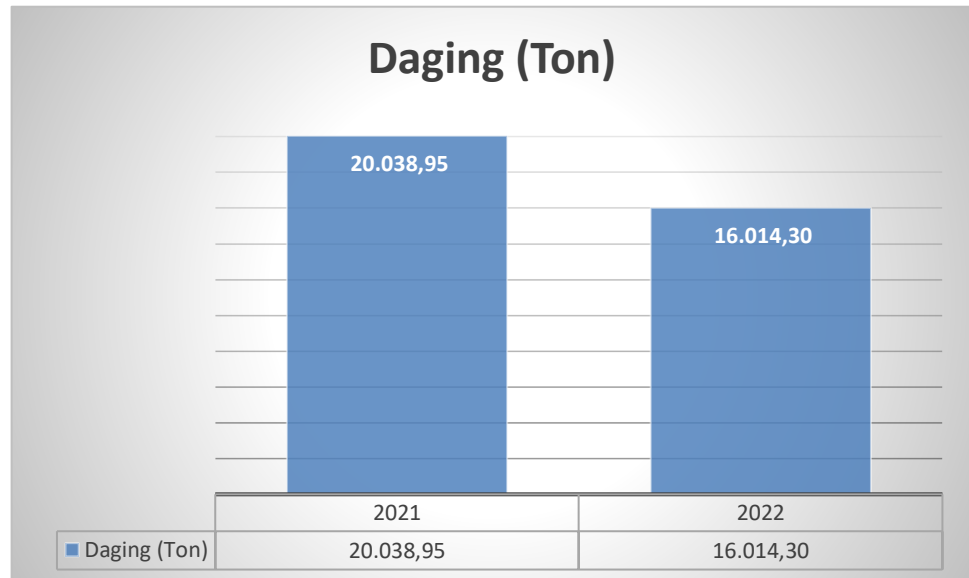
Demikian juga dengan pelaksanaan inseminasi buatan (IB) di Kabupaten Lombok Timur telah berjalan sukses dari tahun ke tahun dengan berhasilnya Kabupaten Lombok Timur memenuhi target yang ditetapkan oleh pusat. Untuk tahun 2022 dengan target 25.000 akseptor dapat terealisasi sebesar 38.956 akseptor walaupun dalam keadaan wabah penyakit PMK. Faktor pendorong dari tingginya tingkat pelayanan ini adalah kesadaran dari masyarakat untuk menggunakan layanan IB untuk mengawinkan ternaknya dan adanya ketersediaan straw yang cukup memadai baik pengadaan di Kabupaten Lombok Timur maupun adanya subsidi dari pusat.

Disamping kegiatan tersebut, pelayanan terhadap eliminasi anjing liar atau pemberantasan anjing liar terus dilakukan secara kontinyu setiap tahunnya untuk menjaga Kabupaten Lombok Timur dari penyakit rabies dan kesehatan lingkungan terutama daerah perkotaan, wilayah pantai dan lokasi wisata dan usulan masyarakat terhadap kegiatan ini terus meningkat, hal ini membuktikan bahwa kepedulian masyarakat terhadap kesehatan dan penyakit yang disebabkan oleh anjing cukup tinggi, mengingat Kabupaten Lombok Timur mempunyai garis pantai yang cukup panjang yang setiap saat mempunyai resiko dan ancaman yang tinggi terhadap penularan rabies.

Pada sasaran strategis ***Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas serta Daya Saing Komoditi Peternakan dengan indikator Kinerja Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan Unggulan Daerah*** pada tahun 2021 ditetapkan target sebesar 19.343,60 ton dengan realisasi sebesar 20.038,95 ton. Untuk tahun 2022 dari target sebesar 20.117,4 ton hanya dapat terealisasi sebesar 16.014,3 atau hanya sebesar 79,60% atau terjadi penurunan sebesar 23,99%. Penurunan realisasi ini disebabkan oleh munurunnya populasi ternak dan penurunan jumlah

pemotongan ternak yang diakibatkan oleh menurunnya permintaan akan daging oleh Masyarakat. Masyarakat takut mengkonsumsi daging sapi/kerbau/kambing karena takut tertular penyakit PMK.

Grafik.3. Jumlah Produksi Daging Tahun 2021-2022



Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan Lotim (2023)

Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur bila dilihat dari nilai pendapatan asli daerah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 walaupun masih di bawah target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan asli daerah terutama setelah terjadinya pemisahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016. Akan tetapi, pada tahun 2022 terjadi penurunan pendapatan asli daerah sebesar 3,30% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya penyakit PMK yang mewabah di Kabupaten Lombok Timur. Pada saat penyakit PMK ini mewabah semua pasar hewan ditutup sehingga menyebabkan tidak ada retribusi pemasukan PAD. Akibat penyakit PMK juga ternak yang dipotong lebih sedikit karena masyarakat takut mengkonsumsi daging sapi.

Tabel 4. Realisasi kinerja PAD sebagaimana tersaji dalam table berikut :

URAIAN	JUMLAH								RATIO (%)			
	2019		2020		2021		2022		2019	2020	2021	2022
	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi				
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	7	8
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>782.114.000</b>	<b>504.636.000</b>	<b>673.472.000</b>	<b>560.824.000</b>	<b>3.003.472.000</b>	<b>1.046.488.500</b>	<b>3.003.472.000</b>	<b>947.320.000</b>	<b>64,52</b>	<b>83,27</b>	<b>34,84</b>	<b>31,54</b>
Pendapatan Asli Daerah	782.114.000	504.636.000	673.472.000	560.824.000	3.003.472.000	1.046.488.500	3.003.472.000	947.320.000	64,52	83,27	34,84	31,54
<i>Hasil Retribusi Daerah</i>	<b>782.114.000</b>	<b>504.636.000</b>	<b>673.472.000</b>	<b>560.824.000</b>	<b>3.003.472.000</b>	<b>1.046.488.500</b>	<b>3.003.472.000</b>	<b>947.320.000</b>	<b>64,52</b>	<b>83,27</b>	<b>34,84</b>	<b>31,54</b>
<i>Retribusi Jasa Usaha</i>	782.114.000	504.636.000	673.472.000	560.824.000	3.003.472.000	1.046.488.500	3.003.472.000	947.320.000	64,52	83,27	34,84	31,54
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	158.114.000	66.354.000	129.600.000	100.975.000	1.059.600.000	420.434.500	1.059.600.000	428.270.000	41,97	77,91	39,68	40,42
Retribusi Rumah Potong Hewan	624.000.000	438.282.000	543.872.000	459.849.000	1.943.872.000	626.054.000	1.943.872.000	519.050.000	70,24	84,55	32,21	26,70

Sumber : Disnakkeswan (2023)



No	Tajuan/Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Hasil/Kegiatan) (output)	Target Renstra OPD pd Th 2023 (i.d. Akhir Periode Renstra)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD pd Renja Th 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Th 2022		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra OPD s.d Th 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d Th 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
												1	2	3	4	5	6	7	8													
3	27	01	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase Realisasi Jasa penunjang Urusan pemerintahan daerah	%	100	213.812.100	100	45.855.000	100	65.300.000	65.300.000	4	2.800.000	96	62.467.500	-	-	-	-	100	65.367.500	99,95	99,95	200	111.122.500	199,89	51,97			
	3	27	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	300	83.502.800	0	-	100	30.000.000	30.000.000	-	-	100	29.970.000	-	-	100	29.970.000	100,00	99,90	100	29.970.000	33,33	35,89			
	3	27	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	130.309.300	100	45.855.000	5	35.300.000	35.300.000	-	2.800.000	5	32.497.500	-	-	5	35.297.500	100,00	99,99	100	81.152.500	69,62	62,28			
	3	27	01	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase Realisasi Jasa penunjang Urusan pemerintahan daerah	%	100	195.973.640	88	44.177.897	100	50.559.000	50.559.000	17	8.403.718	7	3.309.747	24	12.800.872	23	11.802.226	70	35.516.563	69,90	70,25	158	79.693.660	157,72	46,67		
	3	27	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	6.243.200	100	2.000.000	12	2.080.000	2.080.000	6	1.034.000	-	-	6	1.035.000	12	2.069.000	100,00	99,47	112	4.069.000	311,11	65,17			
	3	27	01	208	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	127.861.280	73	22.897.097	12	35.700.000	35.700.000	2	4.675.718	-	1.259.747	2	6.080.872	8	8.652.226	12	20.688.563	100,00	57,90	85	43.365.660	237,37	34,05	
	3	27	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	15	15.608.000	100	5.000.000	5	5.300.000	5.300.000	1	1.300.000	-	-	1	750.000	3	3.150.000	5	5.300.000	100,00	100,00	105	10.300.000	700,00	85,35	
	3	27	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urum Kantor yang Disediakan	Laporan	90	46.761.100	100	14.480.000	20	7.579.000	7.579.000	4	1.394.000	5	2.050.000	11	4.135.000	30	7.579.000	100,00	100,00	120	22.059.000	133,33	47,17			
	3	27	01	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	525.798.530	85	136.764.233	100	2.887.128.250	2.895.282.650	9	9.742.049	69	1.426.369.400	27	783.317.158	4	428.418.650	100	2.847.427.257	100,00	98,35	185	2.964.391.490	185,15	563,79		
	3	27	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dihayati Perakus	Unit	32	250.226.390	100	46.103.608	32	62.807.500	66.852.200	2	7.987.249	6	12.275.500	8	17.198.876	14	25.171.400	30	62.633.025	94,09	93,69	130	108.736.631	406,59	43,46	
	3	27	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	Unit	30	41.689.185	80	5.855.625	30	13.890.500	10.000.000	-	-	-	-	2	560.000	12	4.190.000	14	4.750.000	45,60	47,50	93	10.605.625	310,96	25,44	
	3	27	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	233.882.955	100	64.805.000	4	2.810.430.250	2.818.430.250	0	1.754.800	2	1.414.073.900	1	765.358.282	1	599.057.250	4	2.780.344.232	102,39	98,65	104	2.845.049.232	2.602,39	1.216,44	
	3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Perentase rata-rata pertumbuhan populasi ternak	%	5	51.355.465.500	100	12.608.346.700	5	12.014.899.000	18.335.349.500	4	2.022.100	332.991.500	2	5.759.250.500	3	10.099.581.100	5	16.196.025.200	100,00	88,33	105	28.804.371.900	2.100,53	56,09			
	3	27	02	202	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kawasan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik Hewan yang dipelihara di Jembak Timur	Jenis	10	48.185.029.760	100	10.867.985.700	10	10.645.128.000	16.676.123.000	3	3.552.100	29.700.000	3	5.358.368.500	3	9.204.402.100	3	14.596.022.700	30,00	87,53	103	25.464.008.400	1.030,00	52,85			
	3	27	02	202	01	Pengamanan Keamanan dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan	VUB	2	46.981.982.000	100	10.483.211.700	2	10.582.000.000	16.612.795.000	3	3.552.100	29.700.000	1	5.356.394.500	1	9.143.152.100	2	14.532.098.700	100,00	87,48	102	25.015.930.400	5.100,00	53,24		
	3	27	02	202	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	1.201.047.760	100	384.754.000	1	63.328.000	63.328.000	-	-	-	-	1	2.074.000	1	61.250.000	1	63.324.000	100,00	99,99	101	448.078.000	888888	37,31	
	3	27	02	203	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak yang menggunakan Teknologi Pakan Ternak Tepat Guna	peternak	14900	137.974.720	100	42.300.000	13.000	42.550.000	42.550.000	199	650.000	8.000	9.900.000	1.700	25.400.000	8888	6.600.000	13.000	42.550.000	100,00	100,00	13.000	84.750.000	93,57	61,42		
	3	27	02	203	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	48	137.974.720	100	42.300.000	12	42.550.000	42.550.000	650.000	3	9.900.000	7	25.400.000	2	6.600.000	12	42.550.000	100,00	100,00	112	84.750.000	233,33	61,42		
	3	27	02	205	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan pakan ternak dan Registrasi ternak	Jumlah Kegiatan Penyediaan pakan ternak dan Registrasi ternak	Kegiatan	2	3.032.461.080	100	1.698.161.000	2	1.326.931.000	1.616.676.500	-	-	1	293.391.500	1	375.482.000	888.579.000	2	1.557.452.500	100,00	96,34	102	3.255.613.500	5.100,00	107,36			
	3	27	02	205	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Ton	150	2.946.523.840	100	1.674.631.000	125	1.299.600.000	1.589.345.500	-	-	22	285.591.500	29	372.882.000	90	873.928.000	141	1.532.401.500	112,80	96,42	241	3.207.032.500	160,67	108,84	
	3	27	02	205	06	Pengawasan Produk Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produk Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	48	85.397.240	100	23.530.000	12	27.331.000	27.331.000	-	-	3	7.800.000	1	2.600.000	7	14.651.000	11	25.051.000	91,67	91,66	111	48.581.000	231,25	56,53	
	3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana pertanian per tahun	%	15	11.002.333.320	100	2.565.299.500	15	2.324.125.000	3.229.355.000	7	3.796.000	1	174.358.800	8	1.629.009.000	6	1.093.887.000	15	2.994.650.800	100,00	89,95	115	5.469.950.300	766,67	49,72		
	3	27	03	202	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Peternakan yang Dibangun	Unit	15	11.002.333.320	108	2.565.299.500	14	2.324.125.000	3.229.355.000	7	3.796.000	1	174.358.800	7	1.629.009.000	6	1.093.887.000	14	2.994.650.800	100,00	89,95	122	5.469.950.300	815,56	49,72		
	3	27	03	202	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun	Unit	3	234.120.000	100	75.000.000	1	839.125.000	839.125.000	5.200.000	174.358.800	1	645.100.000	-	5.850.000	1	830.508.800	100,00	98,97	101	905.508.800	3.366,67	386,77			
	3	27	03	202	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	12	10.768.193.120	100	2.490.299.500	10	1.485.000.000	2.390.230.000	2.196.000	-	-	4	983.909.000	6	1.088.037.000	10	2.074.342.000	100,00	86,78	110	4.564.441.500	916,67	42,39		

No	Tujuan/Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pd Th 2023 (s.d. Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sd Renja OPD Th 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2022		Realisasi Kinerja Pada Trisulastri								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Th 2022	Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra OPD s/d Th 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Th 2022 (%)	OPD Penanggung Jawab																											
					Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																									
		3 27 04	PROGRAM PENCEGAHAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerasia terjalimnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dari PHM	%	100	4.316.845.400	100	2.001.847.000	100	1.940.689.500	1.940.689.500	1	15.228.200	40	767.604.500	12	241.037.500	24	467.171.900	77	1.491.242.100	77,00	76,83	100	1.492.889.100	100,00	80,91																						
		3 27 04 201	Penjagaan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah penyakit hewan dan zoonosis per tahun	%	5	1.396.421.400	100	442.292.000	2	422.277.600	422.277.600		3.102.000	1	220.116.000		62.100.000	1	136.942.800	2	422.260.800	100,00	100,00	102	864.552.800	2.040,00	61,91																						
		3 27 04 201 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	12	1.396.421.400	100	442.292.000	12	422.277.600	422.277.600		3.102.000	1	220.116.000	2	62.100.000	4	136.942.800	12	422.260.800	100,00	100,00	112	864.552.800	933,33	61,91																						
		3 27 04 202	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Intensitas pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan	Kali	167	239.697.320	100	73.137.000	55	70.486.600	70.486.600		1.100.700	26	33.000.000	10	12.335.000	18	24.050.900	63	70.486.600	114,55	100,00	163	143.623.600	97,60	59,92																						
		3 27 04 202 03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	36	239.697.320	100	73.137.000	12	70.486.600	70.486.600		1.100.700	4	33.000.000	2	12.335.000	4	24.050.900	12	70.486.600	100,00	100,00	112	143.623.600	311,11	59,92																						
		3 27 04 203	Pengalihan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penerasia pengambilan sampel per populasi	%	1	18.417.440	100	4.900.000	1	500.000.000	500.000.000		2.800.000		199.908.500		76.200.000	1	221.800.000	1	499.908.500	100,00	99,98	101	504.808.500	#####	2.740,93																						
		3 27 04 203 01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	500	18.417.440	100	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	20,00	-																				
		3 27 04 203 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	6	-	100	4.900.000	12	500.000.000	500.000.000		2.000.000	5	199.908.500	2	76.200.000	5	221.800.000	12	499.908.500	100,00	99,98	112	504.808.500	1.856,67	-	-	-																				
		3 27 04 204	Penerapan dan Pengawasan Penerapan Teknik Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pelaku Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Orang	50	2.332.388.560	100	1.379.678.000	50	747.697.300	847.697.300		7.668.300	16	267.780.000	4	74.802.500	3	47.907.400	23	398.158.200	46,00	46,97	123	1.777.836.200	246,00	76,22																						
		3 27 04 204 01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	36	2.233.216.960	100	1.372.908.000	12	717.577.300	817.577.300		6.067.800	4	257.880.000	1	71.502.500		32.587.900	5	368.038.200	41,67	45,02	105	1.740.946.200	291,67	77,96																						
		3 27 04 204 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	32	99.171.600	100	6.770.000	12	30.120.000	30.120.000		1.600.500	4	9.900.000	1	3.300.000	6	15.319.500	12	30.120.000	100,00	100,00	112	36.890.000	350,00	37,20																						
		3 27 04 205	Penerapan dan Pengawasan Penerapan Teknik Kesejahteraan Hewan	Jumlah pemotongan ternak tercatat di RPH/TPH	ekor	36000	329.920.680	100	101.840.000	12.000	100.228.000	100.228.000	-	1.357.200	47	46.800.000		15.600.000	#####	36.470.800	#####	100.228.000	100,00	100,00	#####	202.068.000	33,61	61,25																						
		3 27 04 205 01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Laporan	30	329.920.680	100	101.840.000	10	100.228.000	100.228.000		1.357.200	5	46.800.000	2	15.600.000	3	36.470.800	10	100.228.000	100,00	100,00	110	202.068.000	366,67	61,25																						
		3 27 06	PROGRAM PERIDINAN USAHA PERTANIAN	Kesejahteraan Usahawan	Jumlah (j)n Usaha Hewan yang direkomendasikan untuk Registrasi dan penerbitan (j)n baru	Unit	24	174.809.600	100	5.975.000	23	10.000.000	10.000.000		1.730.000	7	3.250.000	-	-	14	4.980.000	23	9.960.000	100,00	99,60	123	15.935.000	512,50	9,12																					
		3 27 06 202	Penerbitan Ijin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Unit Usaha Hewan yang legal	Unit	24	174.809.600	100	5.975.000	23	10.000.000	10.000.000		1.730.000	7	3.250.000	-	-	14	4.980.000	23	9.960.000	100,00	99,60	123	15.935.000	512,50	9,12																						
		3 27 06 202 01	Penatausahaan Penerbitan Ijin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Ijin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen	12	174.809.600	100	5.975.000	12	10.000.000	10.000.000		1.730.000	4	3.250.000			6	4.980.000	12	9.960.000	100,00	99,60	112	15.935.000	933,33	9,12																						
Jumlah Total							89.627.788.074		29.892.130.309			27.770.984.999	89.028.809.012		1.617.284.894		1.989.012.967		10.769.200.982		16.136.790.970		81.876.138.728	91,40	91,40		16.879.388.202	719,94	63,46																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																		
Predikat kinerja																																																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya Fasilitas Klinik, SDM dan Anggaran																																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Koordinasi dalam peningkatan kinerja dan pelaporan kinerja masih kurang mendukung																																																		
Tidak lanjut diperlukan dalam trisulastri berikutnya : Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan kinerja dan pelaporan kinerja																																																		
Tidak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya :																																																		

Tabel 6. Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 TW. I – III

Formulir E. 81 - Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
PERIODE PELAKSANAAN : JANUARI 2022 S.D. JUNI 2023

OPD DAN KESEHATAN HEWAN  
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD :

Tujua No	Sasara n	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output)	Target Renstra OPD pd Thn 2023 (s.d. Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sd Renja OPD Th 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Th 2023		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra OPD sid Th 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD sd Th 2023 (%)													
					Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
					5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	12a=12/7x100%	13 = (6 + 12)	14=13/5x100%																							
1	Tujuan																																					
	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Peternakan																																					
	Sasaran																																					
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas komoditi peternakan																																					
UR	3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			89.286.989.875	0,00	56.878.245.232	29.461.801.974	1.629.087.237	7.240.316.522	4.058.997.653																									
OPD	3	27		2 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			89.286.989.875	0,00	56.878.245.232	29.461.801.974	1.629.087.237	7.240.316.522	4.058.997.653																									
Pr	3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	22.455.973.315	100,00	19.095.098.932	100	8.323.777.974	18	1.458.742.237	32	2.635.930.353	21	1.710.903.333																				
					Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	Persen	100	39.566.280	131	18.823.000	100	5.000.000			33	1.648.000																						
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	15.686.040	37	8.967.000	4	2.000.000			2	1.055.000																						
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	23.880.240	38	11.856.000	5	3.000.000			1	593.000																						
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																																	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	%	100	21.396.459.125	198	15.746.578.262	100	8.148.328.834	18	1.430.417.101	32	2.620.031.488	21	1.685.980.817																			
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	102	20.774.420.805	133	15.329.555.422	102	7.912.926.634	18	1.411.771.401	33	2.558.811.488	21	1.654.148.217																				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	36	595.070.200	45	407.673.840	12	230.271.200	1	16.336.700	3	61.220.000	2	31.831.600																			
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																																	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	38	9.383.040	58	4.392.000	16	3.131.000	1	242.000																							
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan aset/barang milik daerah	%	100	161.429.280	200	106.057.000	100	44.993.600	17	7.487.500	27	12.100.000	15	6.600.000																			
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	161.429.280	104	106.057.000	4	44.993.600	1	7.487.500	1	12.100.000	1	6.600.000																			



No	Tajaman Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pd Thn 2023 (s.d. Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD ad Renja OPD Th 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2023		Realisasi Kinerja Pada Trivulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Th 2023		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra OPD ad Th 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD ad Th 2023 (%)								
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
	3	27	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	Persoran	100	255.257.400	98	68.433.633	100	42.003.000	15	6.387.000	1	270.000	1	18	270.000	-	-	16	6.527.000	16,40	96,49	193	75.368.820	182,87	29,52	
	3	27	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didatangkan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didatangkan	Paket	10	9.304.600	110	5.186.000	10	3.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	5.186.000	1.100,00	95,38	
	3	27	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didatangkan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didatangkan	Paket	30	34.998.400	130	25.004.000	30	5.000.000	16	2.728.000	-	-	-	-	-	-	-	16	2.728.000	54,50	54,58	146	27.752.000	487,54	79,30
	3	27	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Didatangkan	Paket	20	10.808.040	100	4.223.800	20	2.785.000	10	1.395.000	-	-	-	-	-	-	-	10	1.395.000	50,00	50,00	130	5.618.800	649,08	51,88
	3	27	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didatangkan	Paket	150	20.876.200	161	9.218.200	150	5.005.000	37	1.234.000	-	-	-	-	-	-	-	37	1.234.000	24,06	34,66	218	10.452.200	145,62	30,57
	3	27	01	206	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerbitan/Penerangan undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Penerbitan/Penerangan undangan yang Didatangkan	Dokumen	4	5.618.880	3	3.340.000	1	1.620.000	0	270.000	0	270.000	0	270.000	-	-	1	810.000	50,00	50,00	4	4.050.000	87,50	72,58	
	3	27	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	173.600.480	103	21.540.970	10	24.488.000	0	760.000	-	-	-	-	-	-	0	760.000	3,11	3,11	103	22.300.970	343,96	12,85	
	3	27	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Persewaan/Usaha Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan aset/barang milik daerah	%	100	213.812.368	206	111.122.588	100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	111.122.588	-	31,87	
	3	27	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Didatangkan	Unit	300	80.502.800	100	29.970.000	100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	29.970.000	-	36,89	
	3	27	01	207	08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Didatangkan	Unit	15	130.309.560	105	81.152.500	5	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	81.152.500	-	62,28	
	3	27	01	208		Penyediaan Jasa Persewaan/Usaha Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Jasa persewaan/Usaha pemerintah daerah	Persoran	100	148.212.488	108	79.693.668	100	30.690.000	15	4.627.187	5	1.844.865	17	3.215.316	-	-	27	11.487.368	37,46	37,48	108	91.181.828	195,58	61,11	
	3	27	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	8.243.200	112	4.059.000	12	2.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	4.059.000	310,93	85,17	
	3	27	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didatangkan	Laporan	36	127.969.280	80	43.369.668	12	25.700.000	2	4.627.187	1	1.094.865	2	3.215.316	-	-	5	10.937.368	42,90	42,58	80	54.933.028	237,52	42,84	
	3	27	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didatangkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didatangkan	Laporan	15	15.608.000	105	10.200.000	5	2.870.000	-	-	1	500.000	-	-	-	-	1	500.000	16,16	16,16	106	10.700.000	706,38	68,87	
	3	27	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil verifikasi Baras	Laporan	12	47.287.000	100,00	14.480.000	12	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	14.480.000	-	31	
	3	27	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persewaan/Usaha Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persoran	100	298.226.396	203	2.964.391.488	100	52.802.540	19	9.823.440	-	206.000	24	12.837.200	-	-	43	22.986.649	42,92	43,31	246	2.987.298.138	246,15	1.192,82	
	3	27	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	32	250.226.390	100	108.736.633	32	52.802.540	6	9.823.440	0	206.000	8	12.837.200	-	-	14	22.986.649	43,31	43,31	144	131.603.282	449,46	52,59	
	3	27	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Alat-alat	Jumlah kendaraan dinas operasional	Unit	30	40.317.323	79,61	5.855.625	30	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	5.855.625	-	15	
	3	27	01	209	10	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/kantor	Unit	4	271.872.231	100,00	64.805.000	4	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	64.805.000	-	34	

No	Tujuan Sasaran	Kode Rakering	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pd Thn 2023 (j.d. Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sd Renja OPD Th 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Th 2023		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra OPD sid Th 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD sd Th 2023 (%)						
					Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
		3 27 82	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase rata-rata pertumbuhan populasi ternak per Tahun	%	3	51.255.466.000	105	28.894.371.900	3	6.458.215.900	-	17.716.000	-	1.810.468.500	-	385.195.000	-	-	-	-	-	-	2.213.289.500	-	34,27	105	31.017.661.400	2.181,62	68,43	
		3 27 82 202	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Keasngan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan yang dipelihara di Lombok Timur	jenis	18	48.185.836.200	118	25.464.808.400	18	3.826.970.000	-	18.881.000	-	1.688.370.000	-	184.100.000	-	-	-	-	-	-	1.884.291.000	-	48,34	118	27.348.299.400	1.180,98	56,78	
		3 27 82 202 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Diakui Pelestarian dan Pemertan	VUS	2	46.985.982.000	102	25.815.930.400	2	3.816.970.000	-	9.900.000	-	1.688.370.000	-	184.100.000	-	-	-	-	-	-	1.883.370.000	-	48,34	102	26.896.300.400	5.100,00	57,25	
		3 27 82 202 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	1.201.048.200	101	448.076.000	1	10.000.000	0	981.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	981.000	9,81	9,81	101	448.050.000	10.100,38	37,33	
		3 27 82 202 03	Peningkatan Mutu dan Penedaran Berh/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peternak yang menggunakan Teknologi Peternakan Tepat Guna	peternak	14008	137.974.720	13180	84.750.000	14008	25.515.000	1.681	3.300.000	3.363	6.808.800	1.681	3.300.000	-	-	-	-	-	6.725	13.200.000	51,73	51,73	13.825	97.958.800	141,61	79,89	
		3 27 82 202 04	Pengawasan Mutu Berh/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Berh/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	48	137.974.720	112	94.790.000	48	25.515.000	2	3.300.000	3	6.800.000	2	3.300.000	-	-	-	-	-	6	13.200.000	51,73	51,73	118	97.950.000	246,27	70,89	
		3 27 82 202 05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Penedaran Berh/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan pakan ternak dan Registrasi ternak	Kegiatan	2	3.832.461.680	182	3.259.870.580	2	2.885.730.000	9	3.535.000	-	114.488.500	-	187.705.000	-	-	-	-	-	9	315.738.500	9,14	12,12	182	3.571.292.800	5.188,14	117,77	
		3 27 82 202 06	Pengendalian Penyediaan Berh/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Berh/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Ton	150	2.946.523.840	341	3.207.032.500	150	2.585.745.000	-	-	6	108.298.500	11	195.105.000	-	-	-	-	-	18	304.403.500	11,77	11,77	258	3.511.436.000	172,12	118,17	
		3 27 82 202 07	Pengawasan Produk Berh/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produk Berh/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	48	85.837.340	111	48.981.000	48	10.985.000	2	3.535.000	3	5.300.000	2	2.800.000	-	-	-	-	-	7	11.336.000	58,72	58,72	118	58.916.000	243,43	69,72	
		3 27 83	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penedaran dan Pengembangan Prasarana peternakan per tahun	%	15	11.802.313.000	115	5.489.950.380	15	1.371.861.500	-	43.100.000	-	598.238.800	-	64.825.500	-	-	-	-	-	-	785.961.500	-	51,49	115	6.175.911.800	764,67	58,13	
		3 27 83 202	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Peternakan yang terbangun	Unit	15	11.802.313.000	122	5.489.950.380	14	1.371.861.500	-	43.100.000	-	598.238.800	-	64.825.500	-	-	-	-	-	-	785.961.500	-	51,49	122	6.175.911.800	813,58	58,13	
		3 27 83 202 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3	234.128.000	101	905.508.800	1	48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	905.508.800	3.580,67	386,77	
		3 27 83 202 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	12	10.768.185.000	110	4.584.441.500	10	1.323.861.500	-	43.100.000	5	598.238.800	-	64.825.500	-	-	-	-	-	-	5	785.961.500	48,22	53,38	115	5.270.403.000	961,88	48,94
		3 27 84	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dari PNB	Persen	100	4.298.427.900	108	3.492.889.180	100	13.588.747.500	1	109.529.000	16	2.195.711.689	14	1.896.383.820	-	-	-	-	-	32	4.283.684.489	31,59	31,59	100	7.896.493.589	188,98	179,83	
		3 27 84 201	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penyakit hewan dan zoonosis per tahun	Persen	3	1.206.421.400	102	864.552.800	3	9.810.880.000	-	-	9	29.852.500	9	1.793.163.820	-	-	-	-	-	9	1.823.116.328	18,58	18,58	102	2.687.889.120	2.047,43	192,47	
		3 27 84 201 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	12	1.396.421.400	112	864.552.800	10	9.810.000.000	-	-	6	29.852.500	2	1.793.163.820	-	-	-	-	-	2	1.823.116.328	18,58	18,58	114	2.687.889.120	951,91	192,47	
		3 27 84 202	Pengawasan Pemasakan dan Pengaliran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Informasi pengawasan Pemasakan dan Pengaliran ternak	Kali	187	238.697.320	183	143.823.680	59	440.117.500	9	78.879.000	18	143.208.800	9	73.108.680	-	-	-	-	-	36	293.179.000	65,51	66,61	199	436.882.680	119,28	182,23	



## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dari Dinas Peternakan dan Keswan adalah Masyarakat petani/peternak dimana jenis layanan yang dilakukan seperti :

a. Pelayanan Inseminasi Buatan

Kegiatan inseminasi buatan dilakukan untuk memperbaiki genetik ternak dan performa ternak lokal. Inseminasi Buatan dilakukan pada ternak yang siap kawin dan dilakukan oleh petugas inseminasi buatan yang telah mendapatkan pelatihan. Pada kegiatan ini ternak dikawinkan dengan straw /semen beku yang berkualitas yang berasal dari bantuan pusat dan ada juga yang dibeli secara sukarela.

b. Pelayanan membantu kelahiran

Kegiatan ini dilakukan untuk membantu peternak yang ternaknya akan melahirkan. Pada kegiatan ini apabila peternak membutuhkan bantuan petugas, maka petugas akan mengunjungi peternak yang sudah menghubungi petugas.

c. Pelayanan Kesehatan hewan

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pelayanan Kesehatan pada ternak yang sakit atau pemberian vitamin untuk mencegah agar ternak tidak sakit. Apabila ada anggaran dari pusat maupun daerah, maka kegiatan ini akan dilakukan serempak oleh petugas dan dokter hewan yang ada di semua UPT Puskesmas dan Peternakan se Kabupaten Lombok Timur. Akan tetapi kalau anggarannya tidak ada, maka petugas akan melayani ternak milik peternak yang sudah menghubungi peternak.

d. Pelayanan bantuan akses Modal (KUR)

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu peternak mengakses modal untuk mengembangkan usaha peternakannya dari perbankan yang bekerjasama dengan Pemda melalui kegiatan KUR Peternakan. Pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 ini ada kegiatan Lombok Timur Berkembang dimana bunga KUR tidak dibayar oleh peternak akan tetapi disubsidi oleh Pemda sehingga peternak sangat diuntungkan dengan kegiatan ini. Untuk KUR ini peternak dapat mengakses di beberapa Bank antara lain Bank BRI, BCA dan BNI.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Keswan**

Berdasarkan capaian kinerja dari tahun 2019 sampai dengan 2021 tidak ada permasalahan yang berarti. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja yang terus meningkat. Akan tetapi pada Tahun 2022 terjadi wabah penyakit PMK di Kabupaten Lombok Timur yang menyebabkan capaian kinerja menurun dari tahun 2021. Dengan adanya penyakit PMK ini, populasi ternak di Kabupaten Lombok Timur menurun karena banyak ternak yang mati terserang penyakit PMK. Dengan menurunnya populasi ternak, maka produksi daging juga ikut menurun. Akibat penyakit PMK juga berpengaruh terhadap PAD yang bersumber dari retribusi pasar hewan dan RPH. Hal ini karena pada saat PMK pasar ternak ditutup selama 3 bulan yang berdampak pada tidak adanya retribusi pasar ternak.

#### **3.2. Isu – isu Strategis**

Pembangunan Peternakan di Kabupaten Lombok Timur masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang memerlukan upaya penyelesaian melalui berbagai terobosan kebijakan dan program yang tersusun secara sistematis dan terarah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan petani.

Dalam rangka itu maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis terkait dengan pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur melalui analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan (SWOT) sebagai berikut :

##### **3.2.1. Analisis Kekuatan (Strength)**

1. Tersedianya Sumber Daya Peternakan yang memadai.
2. Adanya Kelembagaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.
3. Tersedianya sarana prasarana infrastruktur peternakan;
4. Tersedianya limbah pertanian untuk pakan ternak
5. Adanya dukungan pembiayaan anggaran melalui sumber dana APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten.

### **3.2.2. Analisis Kelemahan (Weaknes)**

1. Kualitas sumber daya manusia aparat yang mengawal penerapan teknologi dan manajemen usaha belum memadai.
2. Fasilitas aparat peternakan belum memadai.
3. Sinergi/kolaborasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan program belum optimal.
4. Kurangnya akses permodalan bagi petani/peternak untuk pengembangan usaha.

### **3.2.3. Analisis Peluang (Opportunities)**

1. Penduduk Kabupaten Lombok Timur sebagian besar bergerak di sektor pertanian.
2. Tingginya animo peternak terhadap penerapan teknologi budidaya, pasca panen dan pemasaran hasil.
3. Adanya kelembagaan petani yang berupa kelompok tani, gapoktan yang teroganisir.
4. Tersedianya limbah pertanian untuk pakan ternak, Pupuk organik dan biogas.
5. Potensi lahan yang cukup besar untuk pengembangan ternak dan HMT.

### **3.2.4. Analisis Ancaman (Threats)**

1. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang terus terjadi setiap tahun mengancam ketersediaan pakan ternak yang berkualitas.
2. Sebagian besar komoditas peternakan dijual dalam bentuk ternak hidup dan bahan baku olahan karena belum berkembangnya pengolahan hasil.
3. Belum terkelolanya kotoran ternak untuk pupuk organik sehingga mengancam pencemaran lingkungan.
4. Kurangnya keterlibatan swasta untuk investasi dibidang peternakan.

- Adanya ancaman serangan Penyakit Hewan Menular (Anthrax, Flu Burung, Flu Babi, Rabies dan PMK)

Dari analisa-analisa di atas, maka dapat dibuat tabel analisis SWOT sebagai berikut:

<b>Analisis Eksternal</b>	<b>Analisis Internal</b>	<b>Kekuatan (S)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya Sumber Daya Peternakan yang memadai.</li> <li>Adanya Kelembagaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.</li> <li>Tersedianya sarana prasarana infrastuktur peternakan;</li> <li>Tersedianya limbah pertanian untuk pakan ternak</li> <li>Adanya dukungan pembiayaan anggaran melalui sumber dana APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten..</li> </ol>	<b>Kelemahan (W)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kualitas sumber daya manusia aparat yang mengawal penerapan teknologi dan manajemen usaha belum memadai.</li> <li>Fasilitas aparat peternakan belum memadai.</li> <li>Sinergi/kolaborasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan program belum optimal.</li> <li>Kurangnya akses permodalan bagi petani/peternak untuk pengembangan usaha.</li> <li>Masih kurangnya aparat peternakan yang profesional sesuai dengan keahlian masing – masing.</li> </ol>
	<b>Peluang (O)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penduduk Kabupaten Lombok Timur sebagian besar bergerak di sektor pertanian.</li> <li>Tingginya animo peter-nak terhadap penerapan teknologi budidaya, pasca panen dan pemasaran hasil.</li> <li>Adanya kelembagaan petani yang berupa kelompok tani, gapoktan yang teroganisir.</li> <li>Kebutuhan terhadap limbah pertanian untuk pakan ternak, pupuk</li> </ol>	<b>S-O</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan produksi Peternakan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dan mendukung ketahanan pangan daerah.</li> <li>Peningkatan Pendapatan Petani melalui upaya peningkatan produksi, pengembangan industry pengolahan hasil, Pengembangan teknologi peter-nakan dan kemitraan usaha.</li> <li>Kelompok tani atau gapoktan yang ada harus mampu memanfaatkan sarana dan prasarana</li> </ol>

<p>organik dan biogas cukup besar.</p> <p>5. Potensi lahan yang cukup besar untuk pengembangan ternak dan HMT.</p>	<p>yang ada untuk meningkatkan usaha dan mencari sumber pembiayaan.</p> <p>4. Mengembangkan teknologi pengolahan limbah pertanian yang efisien dan ramah lingkungan untuk pakan ternak konsentrat.</p> <p>5. Peningkatan jumlah anggaran untuk pengembangan kawasan peternakan yang berbasis korporasi petani.</p>	<p>4. Fasilitasi teknologi pengolahan limbah peternakan menjadi biogas, pupuk organik dan souvenir .</p> <p>5. Mengembangkan kawasan peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir berbasis korporasi petani.</p>
<p><b>Ancaman (T)</b></p> <p>1. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang terus terjadi setiap tahun mengancam ketersediaan pakan ternak yang berkualitas.</p> <p>2. Sebagian besar komoditas peternakan dijual dalam bentuk ternak hidup dan bahan baku olahan karena belum berkembangnya pengolahan hasil.</p> <p>3. Belum terkelolanya kotoran ternak untuk pupuk organik sehingga mengancam pencemaran lingkungan.</p> <p>4. Kurangnya keterlibatan swasta untuk investasi dibidang peternakan.</p> <p>5. Adanya ancaman serangan penyakit hewan menular (PMK, anthrax, flu burung, flu babi dan rabies)</p>	<p><b>S-T</b></p> <p>1. Penyusunan regulasi tentang perlindungan lahan pertanian.</p> <p>2. Tenaga penyuluh, aparat peternakan membantu petani mempromosikan komoditi peternakan.</p> <p>3. Pengujian dosis pupuk spesifik lokasi dan dosis kombinasi pupuk organik dengan demplot atau dem area sehingga petani termotivasi untuk memanfaatkan pupuk organik dari kotoran ternak.</p> <p>4. Temu usaha kemitraan antara peternak dan pengusaha/investor.</p> <p>5. Melakukan vaksinasi dan pengobatan ternak.</p>	<p><b>W-T</b></p> <p>1. Peningkatan koordinasi antar lembaga terhadap tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya sumber daya air.</p> <p>2. Pengembangan aplikasi online sebagai media promosi komoditi olahan peternakan</p> <p>3. Peningkatan kemampuan aparatur dalam pengawalan penerapan teknologi budi-daya</p> <p>4. Peningkatan koordinasi, promosi, pemasaran dan pengolahan hasil peternakan.</p> <p>5. Peningkatan koordinasi program pendidikan dan pelatihan pertanian/ peternakan oleh lembaga yang berwenang untuk meningkatkan profesionalisme aparat peternakan.</p>



Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dirumuskan sejumlah isu-isu strategis pembangunan peternakan daerah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang, yang perlu mendapatkan perhatian serius antara lain :

**1. Rendahnya produksi dan produktifitas komoditas peternakan.**

Menurunnya produksi dan produktifitas hasil-hasil peternakan di Lombok Timur umumnya disebabkan oleh kendala biofisik (termasuk dampak perubahan iklim), sosial (kelembagaan), ekonomi (permodalan) serta kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi ‘*top down*’ daripada bernuansa pemberdayaan dan mendorong partisipasi lokal;

**2. Persoalan kapasitas sumberdaya peternakan.**

Kapasitas SD peternakan (petani/peternak; kelembagaan; permodalan; infrastruktur dan aparat pemerintahan) masih perlu mendapat perhatian serius guna mendukung keberhasilan menumbuh-kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya di Kabupaten Lombok Timur.

**3. Masih rendahnya daya saing komoditi Peternakan.**

Berbagai produk hasil pertanian (dalam artian luas) di Kabupaten Lombok Timur belum banyak dilakukan pengolahan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi, upaya-upaya yang dilakukan di bidang pertanian dan peternakan ini lebih banyak mengarah pada peningkatan produktivitas (*on farm*), sedangkan upaya *off farm* masih rendah, sehingga nilai tambah atas produk-produk peternakan ini masih relative rendah hal ini menyebabkan tidak mampu bersaing dengan produk lain yang sejenis dari luar daerah.

**4. Lemahnya daya dukung para pihak terkait pengembangan peternakan sebagai sektor unggulan daerah.**

Minimnya dukungan sektor lainnya bagi pengembangan sub sektor peternakan dalam arti luas masih menjadi persoalan klasik pembangunan

daerah. Karena itu, kemitraan antar berbagai sektor pembangunan daerah dalam mendukung pengembangan pertanian terpadu (mekanisasi dan kearifan lokal) akan mendorong terwujudnya peternakan yang tangguh dan berdaya saing di tingkat regional, nasional maupun global.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN


### 4.1. Tujuan dan Sasaran

Tabel 7. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formula	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Realisasi	Target		
							2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Produksi dan produktivitas ternak	Peningkatan Populasi Ternak (Unit Ternak)	$\Sigma$ Populasi ternak tahun <i>T</i> berdasarkan hasil update data populasi ternak untuk semua jenis ternak yang dikonversi kedalam satuan unit ternak				162.487	172.178	175.794	179.661
2				Meningkatnya Produksi Daging dan Telur	Peningkatan Produksi daging (ton)	$Populasi\ Ternak\ Tahun\ T \times parameter\ rata2\ berat\ karkas\ ternak\ dari\ populasi) / 1000$	23.672,58	#####	24.628,95	25.121,53
3					Peningkatan Produksi Telur (ton)	$Populasi\ Ternak\ Tahun\ T \times parameter\ rata2\ berat\ telur\ ternak\ dari\ populasi) / 1000$	4.805,66	4.949,83	5.098,32	5.102,78

## 4.2 Cascading Tahun 2024

### CASCADING DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2024

Tujuan	"MENINGKATKAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TERNAK" INDIKATOR: PENINGKATAN POPULASI TERNAK (UNIT TERNAK) TARGET: 172.178 UNIT TERNAK												Selon, 15 Februari 2024	
Eselon II	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur,  Ir. H. MASYHUR, SP NIP. 19661231 199203 1 150													
	1. Bidang Produksi Peternakan				2. Bidang Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet				3. Bidang Pengembangan Usaha Peternakan					
ESELON III	<b>SASARAN</b> Meningkatnya Kualitas dan kuantitas sarana peternakan <b>INDIKATOR</b> Persentase Ketersediaan Bibit/Benhil Ternak yang Berkualitas <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Populasi ternak tahun ini} - \sum \text{populasi ternak tahun lalu dibagi } \sum \text{populasi ternak tahun lalu} \times 100}{100}$ <b>PROGRAM</b> PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN <b>TARGET : 65 %</b> Rp. 1.822.636.560,-	<b>SASARAN</b> Meningkatnya Kualitas Prasarana peternakan <b>INDIKATOR</b> Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana peternakan per tahun <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Prasarana tahun ini} - \sum \text{Prasarana tahun lalu}}{\sum \text{Prasarana tahun lalu} \times 100}$ <b>PROGRAM</b> PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN <b>TARGET : 15 %</b> Rp. 183.275.040,-	<b>SASARAN</b> Terkendalinya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner <b>INDIKATOR</b> Persentase terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dari PHM <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Kasus PHM tahun ini} - \sum \text{Kasus PHM tahun lalu}}{\sum \text{Kasus tahun ini} \times 100}$ <b>PROGRAM</b> PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER <b>TARGET : 100 %</b> Rp. 13.693.242.906,-	<b>SASARAN</b> Tertatanya Perizinan Usaha Peternakan <b>INDIKATOR</b> Jumlah Ijin Usaha Hewan yang direkomendasikan untuk Registrasi dan penerbitan ijin baru <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Perusahaan Peternakan yg mengurus ijin baru/perpanjangan}}{\sum \text{Perusahaan Peternakan yg mengurus ijin baru/perpanjangan}}$ <b>PROGRAM</b> PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN <b>TARGET : 25 Unit Usaha</b> Rp. -,-										
	<b>SASARAN</b> Terpeliharanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan <b>INDIKATOR</b> Jumlah Sumber Daya Genetik Hewan yang dipelihara di Lombok Timur <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Jenis Ternak yang dipelihara di Lombok Timur}}{\sum \text{Jenis Ternak yang dipelihara di Lombok Timur}}$ <b>KEGIATAN</b> Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota <b>TARGET : 10 Jenis</b> Rp. 151.809.760,-	<b>SASARAN</b> Bertambahnya Mutu Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan <b>INDIKATOR</b> Jumlah Peternakan yang menggunakan Teknologi Peternakan Tepat Guna <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Aksesor IB per tahun}}{\sum \text{Aksesor IB per tahun}}$ <b>KEGIATAN</b> Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota <b>TARGET : 14.000 Peternak</b> Rp. 26.066.124,-	<b>SASARAN</b> Terkendalinya terpaunya Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan <b>INDIKATOR</b> Jumlah Kegiatan Penyediaan pakan ternak dan Registrasi ternak <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Frekuensi (kali) pengawasan peredaran Pakan ternak}}{\sum \text{Frekuensi (kali) pengawasan peredaran Pakan ternak}}$ <b>KEGIATAN</b> Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota <b>TARGET : 2 Kegiatan</b> Rp. 1.644.760.676,-	<b>SASARAN</b> Terbangunnya prasarana peternakan yang optimal <b>INDIKATOR</b> Jumlah Prasarana Peternakan yang terbangun <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Prasana kantor dan kandang kelompok yang terbangun}}{\sum \text{Prasana kantor dan kandang kelompok yang terbangun}}$ <b>KEGIATAN</b> Pembangunan Prasarana Pertanian <b>TARGET : 15 Unit</b> Rp. 183.275.040,-	<b>SASARAN</b> Terjalinnya Kesehatan Hewan dari wabah penyakit hewan menular yang <b>INDIKATOR</b> % Penurunan jumlah penyakit hewan dan zoonosis menular <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{ternak yang terangsang tahun T} - \sum \text{tahun N dibagi dengan tahun N} \times 100}{100}$ <b>KEGIATAN</b> Penerimaan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota <b>TARGET : 5 %</b> Rp. 9.960.600.000,-	<b>SASARAN</b> Terawasainya Pemasakan dan Pengeluaran Hewan dari Produk Hewan Daerah <b>INDIKATOR</b> Intensitas pengawasan Pemasakan dan Pengeluaran ternak <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Frekuensi Monitoring pengawasan talulintas ternak}}{\sum \text{Frekuensi Monitoring pengawasan talulintas ternak}}$ <b>KEGIATAN</b> Pengawasan Pemasakan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota <b>TARGET : 167 kali</b> Rp. 449.603.606,-	<b>SASARAN</b> Terkendalinya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner <b>INDIKATOR</b> Persentase pengambilan sampel per populasi <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{sampel dibagi dengan Populasi ternak}}{\sum \text{sampel dibagi dengan Populasi ternak}}$ <b>KEGIATAN</b> Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota <b>TARGET : 1 %</b> Rp. 2.615.066.140,-	<b>SASARAN</b> Diterapkannya Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner <b>INDIKATOR</b> Jumlah pemotongan ternak tercatat di RPH/TPH <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Pemotongan ternak Sapi, Kerbau, kambing di RPH dan TPH dalam 1}}{\sum \text{Pemotongan ternak Sapi, Kerbau, kambing di RPH dan TPH dalam 1}}$ <b>KEGIATAN</b> Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner <b>TARGET : 36.000 ekor</b> Rp. 60.000.000,-	<b>SASARAN</b> Diterapkannya Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner <b>INDIKATOR</b> Jumlah Petaku Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Rekapitulasi } \sum \text{Petaku usaha pengalihan hasil per tahun}}{\sum \text{Rekapitulasi } \sum \text{Petaku usaha pengalihan hasil per tahun}}$ <b>KEGIATAN</b> Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner <b>TARGET : 50 orang</b> Rp. 607.973.160,-	<b>SASARAN</b> Tertibnya Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan <b>INDIKATOR</b> Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Usaha Kesejahteraan Hewan <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Unit usaha yang memiliki ijin Usaha}}{\sum \text{Unit usaha yang memiliki ijin Usaha}}$ <b>KEGIATAN</b> Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan <b>TARGET : 25 Unit Usaha</b> Rp. -,-				
ESELON IV	<b>SASARAN</b> Terjaminnya kemurnian dan kelestarian Sumber Daya Genetik Hewan <b>INDIKATOR</b> Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelesterian dan Pemurnian <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Pelesterian dan Pemurnian}}{\sum \text{Pelesterian dan Pemurnian}}$ <b>SUB KEGIATAN</b> Peningkatan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman <b>10 LAPORAN</b> Rp. 141.593.760,-	<b>SASARAN</b> Meningkatnya kualitas Sumber Daya Genetik Hewan <b>INDIKATOR</b> Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Dokumen SDG per tahun}}{\sum \text{Dokumen SDG per tahun}}$ <b>SUB KEGIATAN</b> Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman <b>10 LAPORAN</b> Rp. 10.216.000,-	<b>SASARAN</b> Tertanyaunya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan <b>INDIKATOR</b> Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman n Skala Kecil <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Laporan Pengawasan}}{\sum \text{Laporan Pengawasan}}$ <b>SUB KEGIATAN</b> Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman n Skala Kecil <b>10 LAPORAN</b> Rp. 26.066.124,-	<b>SASARAN</b> Terkendalinya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak <b>INDIKATOR</b> Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Pakan yang di distribusikan}}{\sum \text{Pakan yang di distribusikan}}$ <b>SUB KEGIATAN</b> Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak <b>3 LAPORAN</b> Rp. 1.624.344.000,-	<b>SASARAN</b> Terawasainya Produk Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan <b>INDIKATOR</b> Jumlah Pengawasan Produk Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Laporan Pengawasan}}{\sum \text{Laporan Pengawasan}}$ <b>SUB KEGIATAN</b> Pengawasan Produk Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan <b>12 LAPORAN</b> Rp. 20.416.676,-	<b>SASARAN</b> Terbangun dan terpeliharanya Prasarana Peternakan Lainnya <b>INDIKATOR</b> Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{RPH dibangun dan rehab}}{\sum \text{RPH dibangun dan rehab}}$ <b>SUB KEGIATAN</b> Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan <b>4 UNIT</b> Rp. 134.238.240,-	<b>SASARAN</b> Terbangun dan terpeliharanya Rumah Potong Hewan <b>INDIKATOR</b> Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{RPH dibangun dan rehab}}{\sum \text{RPH dibangun dan rehab}}$ <b>SUB KEGIATAN</b> Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan <b>1 UNIT</b> Rp. 49.036.800,-	<b>SASARAN</b> Terkendalinya teranggulangnya penyakit hewan dan zoonosis <b>INDIKATOR</b> Jumlah Wilayah atau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan zoonosis dalam Daerah Kabupaten/Kota <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Laporan Penurunan Kasus}}{\sum \text{Laporan Penurunan Kasus}}$ <b>SUB KEGIATAN</b> Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota <b>12 Laporan</b> Rp. 9.960.600.000	<b>SASARAN</b> Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Produk Hewan dari Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten <b>INDIKATOR</b> Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Laporan hewan yang diperiksa}}{\sum \text{Laporan hewan yang diperiksa}}$ <b>SUB KEGIATAN</b> Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pemindah Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM <b>12 Laporan</b> Rp. 449.603.606,-	<b>SASARAN</b> Tersedianya pelayanan Jasa Medik Veteriner <b>INDIKATOR</b> Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Laporan layanan keswan}}{\sum \text{Laporan layanan keswan}}$ <b>SUB KEGIATAN</b> Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner <b>12 Laporan</b> Rp. 2.615.066.140,-	<b>SASARAN</b> Terawasainya Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan <b>INDIKATOR</b> Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Laporan Pembinaan}}{\sum \text{Laporan Pembinaan}}$ <b>SUB KEGIATAN</b> Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha <b>12 Laporan</b> Rp. 60.000.000,-	<b>SASARAN</b> Diterapkannya Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner <b>INDIKATOR</b> Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Laporan pengawasan}}{\sum \text{Laporan pengawasan}}$ <b>SUB KEGIATAN</b> Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan <b>12 Laporan</b> Rp. 51.080.000,-	<b>SASARAN</b> Tertibnya petaku Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan <b>INDIKATOR</b> Jumlah unit usaha produk Hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Laporan Pembinaan}}{\sum \text{Laporan Pembinaan}}$ <b>SUB KEGIATAN</b> Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan <b>12 Unit usaha</b> Rp. 556.863.160,-	<b>SASARAN</b> Tertibnya Perizinan Usaha Peternakan dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan <b>INDIKATOR</b> Jumlah Pendampingan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan <b>FORMULA</b> $\frac{\sum \text{Lap.izin dan rekomendasi izin yang diterbitkan}}{\sum \text{Lap.izin dan rekomendasi izin yang diterbitkan}}$ <b>SUB KEGIATAN</b> Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan <b>25 Unit Usaha</b> Rp. -,-

# Cascading Tahun 2025

## CASCADING DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2025

Tujuan	"MENINGKATKAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TERNAK" INDIKATOR: PENINGKATAN POPULASI TERNAK (UNIT TERNAK) TARGET: 172.178 UNIT TERNAK													
Eselon II	<p>Sasaran: Meningkatkan Produk Daging dan Telur</p> <p>Indikator: Peningkatan Produksi Daging (ton), Peningkatan Produksi Telur (ton)</p> <p>Target: Produksi Daging 24.146,03 ton, Produksi Telur 49.498,30</p>													
	1. Bidang Produksi Peternakan				2. Bidang Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmasvet				3. Bidang Pengembangan Usaha Peternakan					
Eselon III	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Meningkatnya Kualitas dan kuantitas sarana peternakan</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Persentasi Ketersediaan Bibit/Benh Ternak yang Berkualitas</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{Populasi ternak tahun ini} - \sum \text{populasi ternak tahun lalu}}{\sum \text{populasi ternak tahun lalu}} \times 100$ <p><b>PROGRAM</b></p> <p>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</p> <p><b>TARGET: 65 %</b></p> <p>Rp. 1.262.005.510,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Meningkatnya Kualitas Prasarana peternakan</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana peternakan per tahun</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{Prasarana tahun ini} - \sum \text{Prasarana tahun lalu}}{\sum \text{Prasarana tahun lalu}} \times 100$ <p><b>PROGRAM</b></p> <p>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</p> <p><b>TARGET: 1,5 %</b></p> <p>Rp. 187.223.781,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Terkendalinya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Persentase terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dari PHM</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{Kasus PHM tahun ini} - \sum \text{Kasus PHM tahun lalu}}{\sum \text{Kasus tahun ini} \times 100}$ <p><b>PROGRAM</b></p> <p>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</p> <p><b>TARGET: 100 %</b></p> <p>Rp. 13.989.016.993,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Tertatarnya Perizinan Usaha Peternakan</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Jumlah Ijin Usaha Hewan yang direkomendasikan untuk Registrasi dan pernebrian ijin baru</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{Perusahaan Peternakan yg mengurus ijin baru/perpanjangan}}{\sum \text{Perusahaan Peternakan yg mengurus ijin baru/perpanjangan}}$ <p><b>PROGRAM</b></p> <p>PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN</p> <p><b>TARGET: 25 Unit Usaha</b></p> <p>Rp. -,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Terpeliharanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Jumlah Sumber Daya Genetik Hewan yang dipelihara di Lombok Timur</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{Jenis Ternak yang dipelihara di Lombok Timur}}{\sum \text{Jenis Ternak yang dipelihara di Lombok Timur}}$ <p><b>KEGIATAN</b></p> <p>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisma Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p><b>TARGET: 10 Jenis</b></p> <p>Rp.155.088.851,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Bertambahnya Mutu Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Jumlah Peternak yang menggunakan Teknologi Peternakan Tepat Guna</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{Aksesoris IB per tahun}}{\sum \text{Aksesoris IB per tahun}}$ <p><b>KEGIATAN</b></p> <p>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>TARGET: 2 Peternak</b></p> <p>Rp. 26.629.152,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Terkendali dan terpantau Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hilsaan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Jumlah kegiatan Penyediaan pakan ternak dan Registrasi ternak</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\text{Frekuensi (kali) pengawasan peredaran Pakan ternak}}{\text{Frekuensi (kali) pengawasan peredaran Pakan ternak}}$ <p><b>KEGIATAN</b></p> <p>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hilsaan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>TARGET: 2 Kegiatan</b></p> <p>Rp. 1.880.287.507,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Terbangunnya prasarana peternakan yang optimal</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Jumlah Prasarana Peternakan yang terbangun</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{Prasana kantor dan kandang kelompok yang terbangun}}{\sum \text{Prasana kantor dan kandang kelompok yang terbangun}}$ <p><b>KEGIATAN</b></p> <p>Pembangunan Prasarana Pertanian</p> <p><b>TARGET: 15 Unit</b></p> <p>Rp. 187.223.781,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Terjaminnya Kesehatan Hewan dari wabah penyakit hewan menular yang</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>% Penurunan jumlah penyakit hewan dan zoonosis per tahun</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{ternak yang terjangkit tahun ini} - \sum \text{ternak yang terjangkit tahun N dibagi dengan tahun ini} \times 100}{\sum \text{ternak yang terjangkit tahun ini} - \sum \text{ternak yang terjangkit tahun N dibagi dengan tahun ini} \times 100}$ <p><b>KEGIATAN</b></p> <p>Penjamanan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>TARGET: 5 %</b></p> <p>10.175.748.960,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Terawasinya Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Intensitas pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran ternak</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\text{Frekuensi Monitoring pengawasan lalu lintas ternak}}{\text{Frekuensi Monitoring pengawasan lalu lintas ternak}}$ <p><b>KEGIATAN</b></p> <p>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>TARGET: 167 kali</b></p> <p>Rp. 459.315.044,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Terkelolanya Pelayanan Jasa Medik Veteriner</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Persentase pengambilan sampel per populasi</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{sampel dibagi dengan Populasi ternak}}{\sum \text{sampel dibagi dengan Populasi ternak}}$ <p><b>KEGIATAN</b></p> <p>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>TARGET: 1 %</b></p> <p>Rp. 2.671.551.569,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Diterapkannya Peryaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Jumlah Pemotongan ternak tercatat di RPH/TPH</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{Pemotongan ternak Sapi, Kerbau, kambing di RPH dan TPH dalam 1}}{\sum \text{Pemotongan ternak Sapi, Kerbau, kambing di RPH dan TPH dalam 1}}$ <p><b>KEGIATAN</b></p> <p>Penerapan dan Pengawasan Peryaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</p> <p><b>TARGET: 36.000 ekor</b></p> <p>Rp. 621.105.380,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Diterapkannya Peryaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Jumlah Petaku Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\text{Rekapitulasi \sum Petaku usaha petogtahan hasil per tahun}}{\text{Rekapitulasi \sum Petaku usaha petogtahan hasil per tahun}}$ <p><b>KEGIATAN</b></p> <p>Penerapan dan Pengawasan Peryaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p><b>TARGET: 50 orang</b></p> <p>Rp. 621.105.380,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Tertatarnya Ijin Usaha Produk Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Passar Hewan, Rumah Potong Hewan</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Usaha Kesejahteraan Hewan</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{Unit usaha yang memiliki ijin Usaha}}{\sum \text{Unit usaha yang memiliki ijin Usaha}}$ <p><b>KEGIATAN</b></p> <p>Penerbitan Ijin Usaha Produk Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Passar Hewan, Rumah Potong Hewan</p> <p><b>TARGET: 22 Unit Usaha</b></p> <p>Rp. -,-</p>
	Eselon IV	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Terjaminnya kemurnian dan kelestarian Sumber Daya genetik hewan</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{Laporan Pelestarian dan Pemurnian}}{\sum \text{Laporan Pelestarian dan Pemurnian}}$ <p><b>SUB KEGIATAN</b></p> <p>Penjamanan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman</p> <p><b>10 LAPORAN</b></p> <p>Rp. 144.652.185,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{Dokumen SDG per tahun}}{\sum \text{Dokumen SDG per tahun}}$ <p><b>SUB KEGIATAN</b></p> <p>Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</p> <p><b>1 DOKUMEN</b></p> <p>Rp. 10.436.666,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Terpantau Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman n Skala Kecil</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{Laporan Pengawasan}}{\sum \text{Laporan Pengawasan}}$ <p><b>SUB KEGIATAN</b></p> <p>Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman n Skala Kecil</p> <p><b>10 LAPORAN</b></p> <p>Rp. 26.629.152,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Terkendalinya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hilsaan Pakan Ternak</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hilsaan Pakan Ternak yang Tersedia</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{Pakan yang di distribusikan}}{\sum \text{Pakan yang di distribusikan}}$ <p><b>SUB KEGIATAN</b></p> <p>Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hilsaan Pakan Ternak</p> <p><b>3 LAPORAN</b></p> <p>Rp. 1.659.429.830,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Jumlah Pengawasan Produk Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{Laporan Pengawasan}}{\sum \text{Laporan Pengawasan}}$ <p><b>SUB KEGIATAN</b></p> <p>Pengawasan Produk Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan</p> <p><b>12 LAPORAN</b></p> <p>Rp. 20.857.676,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Terbangun dan terpeliharanya Prasarana Peternakan Lainnya</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{Prasarana klp yg di bangun}}{\sum \text{Prasarana klp yg di bangun}}$ <p><b>SUB KEGIATAN</b></p> <p>Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya</p> <p><b>4 UNIT</b></p> <p>Rp. 137.137.786,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Terbangun dan terpeliharanya Rumah Potong Hewan</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{RPH dibangun dan rehab}}{\sum \text{RPH dibangun dan rehab}}$ <p><b>SUB KEGIATAN</b></p> <p>Pembangunan, Rehabilitasi, dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan</p> <p><b>1 UNIT</b></p> <p>Rp. 50.095.995,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Terkendalinya kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Jumlah Wilayah atau Kawasan yang Mengatasi Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam Daerah Kabupaten</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{Laporan Penurunan Kasus}}{\sum \text{Laporan Penurunan Kasus}}$ <p><b>SUB KEGIATAN</b></p> <p>Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>12 Laporan</b></p> <p>Rp. 10.175.748.960</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Temporal Peternakan/HPM</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{Laporan hewan yang diperiksa}}{\sum \text{Laporan hewan yang diperiksa}}$ <p><b>SUB KEGIATAN</b></p> <p>Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Perantara Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Temporal Peternakan/HPM</p> <p><b>12 Laporan</b></p> <p>Rp. 459.315.044,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Tersedianya pelayanan jasa Medik Veteriner</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{Laporan layanan keswan}}{\sum \text{Laporan layanan keswan}}$ <p><b>SUB KEGIATAN</b></p> <p>Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner</p> <p><b>12 Laporan</b></p> <p>Rp. 2.671.551.569,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{Laporan Pembinaan}}{\sum \text{Laporan Pembinaan}}$ <p><b>SUB KEGIATAN</b></p> <p>Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha</p> <p><b>12 Unit usaha</b></p> <p>Rp. 61.296.000,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{Laporan pengawasan}}{\sum \text{Laporan pengawasan}}$ <p><b>SUB KEGIATAN</b></p> <p>Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</p> <p><b>12 Laporan</b></p> <p>Rp. 52.183.328,-</p>	<p><b>SASARAN</b></p> <p>Terbinanya pelaku Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan</p> <p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi</p> <p><b>FORMULA</b></p> $\frac{\sum \text{Lap. Ijin dan rekomendasi izin yang diterbitkan}}{\sum \text{Lap. Ijin dan rekomendasi izin yang diterbitkan}}$ <p><b>SUB KEGIATAN</b></p> <p>Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan</p> <p><b>12 Unit usaha</b></p> <p>Rp. 567.598.059,-</p>

# Cascading Tahun 2026

## CASCADING DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2026

Tujuan	"MENINGKATKAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TERNAK" INDIKATOR: PENINGKATAN POPULASI TERNAK (UNIT TERNAK) TARGET: 172.178 UNIT TERNAK																											
Eselon II	1. Bidang Produksi Peternakan				2. Bidang Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet				3. Bidang Pengembangan Usaha Peternakan																			
	<b>SASARAN</b> Meningkatnya Kualitas dan kuantitas sarana peternakan <b>INDIKATOR</b> Persentase Ketersediaan Bibi/Benh Ternak yang Berkualitas <b>FORMULA</b> $\sum$ Populasi ternak tahun ini - $\sum$ populasi ternak tahun lalu dibagi $\sum$ populasi ternak tahun lalu x 100 <b>PROGRAM</b> PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN <b>TARGET : 65 %</b> Rp. 1.902.224.829,-				<b>SASARAN</b> Meningkatnya Kualitas Prasarana peternakan <b>INDIKATOR</b> Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana peternakan per tahun <b>FORMULA</b> $\sum$ Prasarana tahun ini - $\sum$ Prasarana tahun lalu dibagi $\sum$ Prasarana tahun lalu x 100 <b>PROGRAM</b> PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN <b>TARGET : 1,5 %</b> Rp. 191.278.031,-				<b>SASARAN</b> Terkendalinya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner <b>INDIKATOR</b> Persentase terjangkitnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dari PHM <b>FORMULA</b> $\sum$ Kasus PHM tahun ini - $\sum$ Kasus PHM tahun lalu x $\sum$ Kasus tahun ini x 100 <b>PROGRAM</b> PROGRAM PENGELOMPOKAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER <b>TARGET : 100 %</b> Rp. 14.291.179.718,95,-				<b>SASARAN</b> Terlaksananya Usaha Peternakan <b>INDIKATOR</b> Jumlah Ijin Usaha Hewan yang direkomendasikan untuk Registrasi dan penerbitan ijin baru <b>FORMULA</b> $\sum$ Perusahaan Peternakan yg mengurus ijin baru/perpanjangan <b>PROGRAM</b> PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN <b>TARGET : 25 Unit Usaha</b> Rp. --															
ESELON III	<b>SASARAN</b> Terpeliharanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan <b>INDIKATOR</b> Jumlah Sumber Daya Genetik Hewan yang diwariskan di Lombok Timur <b>FORMULA</b> $\sum$ Jenis Ternak yang dipelihara di Lombok Timur <b>Kegiatan</b> Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan: Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota <b>TARGET : 10 Jenis</b> Rp.158.438.770,-		<b>SASARAN</b> Bertambahnya Mutu Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan <b>INDIKATOR</b> Jumlah Kegiatan Pengawasan pakan ternak dan Registrasi ternak <b>FORMULA</b> $\sum$ Akseptor IB per tahun <b>Kegiatan</b> Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota <b>TARGET : 14.000 Peternak</b> Rp. 27.204.342,-		<b>SASARAN</b> Terkendalinya terapannya Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota <b>INDIKATOR</b> Jumlah Kegiatan Penyediaan pakan ternak dan Registrasi ternak <b>FORMULA</b> Frekuensi (kali) pengawasan peredaran Pakan ternak <b>Kegiatan</b> Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hewan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota <b>TARGET : 2 Kegiatan</b> Rp. 1.716.581.717,-		<b>SASARAN</b> Terbangunnya prasarana peternakan yang optimal <b>INDIKATOR</b> Jumlah Prasarana Peternakan yang terbangun <b>FORMULA</b> $\sum$ Prasarana kantor dan kandang kelompok yang terbangun <b>Kegiatan</b> Pembangunan Prasarana Pertanian <b>TARGET : 15 Unit</b> Rp. 191.278.031,-		<b>SASARAN</b> Terjangkitnya Kesehatan Hewan dari wabah penyakit hewan menular yang zoonosis per tahun <b>INDIKATOR</b> % Penurunan jumlah penyakit hewan dan zoonosis per tahun <b>FORMULA</b> $\sum$ ternak yang terjangkit tahun T - $\sum$ ternak N dibagi dengan Tahun N x 100 <b>Kegiatan</b> Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota <b>TARGET : 5 %</b> Rp. 10.395.545.138,-		<b>SASARAN</b> Terawastinya Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah <b>INDIKATOR</b> Intensitas pengawasan Pemasukan dan Pelepasan ternak <b>FORMULA</b> Frekuensi Monitoring pengawasan keselamatan ternak <b>Kegiatan</b> Pengawasan Pemasukan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota <b>TARGET : 167 kali</b> Rp. 469.238.249,-		<b>SASARAN</b> Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner <b>INDIKATOR</b> Persentase pengambilan sampel per populasi <b>FORMULA</b> $\sum$ sampel dibagi dengan Populasi ternak <b>Kegiatan</b> Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota <b>TARGET : 1 %</b> Rp. 2.729.257.083,-		<b>SASARAN</b> Diterapkannya Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan <b>INDIKATOR</b> Jumlah pemotongan ternak tercatat di RPH (RPH) dan RPH (TPH) <b>FORMULA</b> $\sum$ Pemotongan ternak Sapi, Kerbau, kambing di RPH dan TPH dalam 1 <b>Kegiatan</b> Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan <b>TARGET : 36.000 ekor</b> Rp. 62.619.994,-		<b>SASARAN</b> Diterapkannya Persyaratan Teknis Kesejahteraan Veteriner <b>INDIKATOR</b> Jumlah Petaku Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan <b>FORMULA</b> Rekapitulasi $\sum$ Petaku usaha pengolahan hasil per tahun <b>Kegiatan</b> Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner <b>TARGET : 50 orang</b> Rp. 634.521.255,95,-		<b>SASARAN</b> Terlaksana Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakti Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan <b>INDIKATOR</b> Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Usaha Kesejahteraan Hewan <b>FORMULA</b> $\sum$ Unit usaha yang memiliki ijin Usaha <b>Kegiatan</b> Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakti Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan <b>TARGET : 25 Unit Usaha</b> Rp. --									
	ESELON IV	<b>SASARAN</b> Terjaminnya kemurnian dan kelestarian Sumber Daya genetik hewan <b>INDIKATOR</b> Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian <b>FORMULA</b> $\sum$ Laporan Pelestarian dan Pemurnian <b>SUB KEGIATAN</b> Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman <b>10 LAPORAN</b> Rp. 147.776.872,-		<b>SASARAN</b> Meningkatnya kualitas Sumber Daya Genetik Hewan <b>INDIKATOR</b> Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman <b>FORMULA</b> $\sum$ Dokumen SDG per tahun <b>SUB KEGIATAN</b> Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman <b>1 DOKUMEN</b> Rp. 10.682.098,-		<b>SASARAN</b> Terlengkapinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan Ternak <b>INDIKATOR</b> Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman n Skala Kecil <b>FORMULA</b> $\sum$ Laporan Pengawasan <b>SUB KEGIATAN</b> Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman n Skala Kecil <b>10 LAPORAN</b> Rp. 27.204.342,-		<b>SASARAN</b> Terkendalinya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak <b>INDIKATOR</b> Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Tersedia <b>FORMULA</b> $\sum$ Pakan yang di distribusikan <b>SUB KEGIATAN</b> Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak <b>3 LAPORAN</b> Rp. 1.695.273.514,-		<b>SASARAN</b> Terawastinya Produk Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan <b>INDIKATOR</b> Jumlah Pengawasan Produk Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan <b>FORMULA</b> $\sum$ Laporan Pengawasan <b>SUB KEGIATAN</b> Pengawasan Produk Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan <b>12 LAPORAN</b> Rp. 21.308.203,-		<b>SASARAN</b> Terbangun dan terpeliharanya Prasarana Peternakan Lainnya <b>INDIKATOR</b> Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara <b>FORMULA</b> $\sum$ Prasarana klp yg di bangun <b>SUB KEGIATAN</b> Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya <b>4 UNIT</b> Rp. 140.099.962,-		<b>SASARAN</b> Terbangun dan terpeliharanya Rumah Potong Hewan <b>INDIKATOR</b> Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi <b>FORMULA</b> $\sum$ RPH dibangun dan rehad <b>SUB KEGIATAN</b> Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan <b>1 UNIT</b> Rp. 51.178.069,-		<b>SASARAN</b> Terkendalinya terapannya pengendalian penyakit hewan dan zoonosis <b>INDIKATOR</b> Jumlah Wilayah atau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam Daerah Kabupaten/Kota <b>FORMULA</b> $\sum$ Laporan Penurunan Kasus <b>SUB KEGIATAN</b> Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota <b>12 Laporan</b> Rp. 10.395.545.138		<b>SASARAN</b> Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten <b>INDIKATOR</b> Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM <b>FORMULA</b> $\sum$ Laporan hewan yang diperiksa <b>SUB KEGIATAN</b> Pengawasan dan Pemeliharaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM <b>12 Laporan</b> Rp. 469.238.249,-		<b>SASARAN</b> Tersedianya pelayanan jasa Medik Veteriner <b>INDIKATOR</b> Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner <b>FORMULA</b> $\sum$ Laporan layanan keswan <b>SUB KEGIATAN</b> Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner <b>12 Laporan</b> Rp. 2.729.257.083,-		<b>SASARAN</b> Terawastinya Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan <b>INDIKATOR</b> Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan <b>FORMULA</b> $\sum$ Laporan Pembinaan <b>SUB KEGIATAN</b> Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha <b>12 Unit usaha</b> Rp. 62.619.994,-		<b>SASARAN</b> Terawastinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan <b>INDIKATOR</b> Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan <b>FORMULA</b> $\sum$ Laporan pengawasan <b>KEGIATAN</b> Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan <b>12 Laporan</b> Rp. 54.663.079,-		<b>SASARAN</b> Terlaksananya Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan <b>INDIKATOR</b> Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi <b>FORMULA</b> $\sum$ Laporan Pembinaan <b>SUB KEGIATAN</b> Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan <b>12 Unit usaha</b> Rp. 579.858.177,-		<b>SASARAN</b> Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakti Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan <b>INDIKATOR</b> Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakti Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan <b>FORMULA</b> $\sum$ Lap.izin dan rekomendasi izin yang diterbitkan <b>KEGIATAN</b> Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakti Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan <b>25 Unit Usaha</b> Rp. --

**BAB V**  
**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Tabel 8. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Keswan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2024 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Ternak	Meningkatnya Populasi Ternak	1. Persentase Ketersediaan Produksi Peternakan	1. Mendorong peningkatan konsumsi pangan asal ternak	1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya peternakan untuk mempercepat peningkatan produksi komoditi peternakan
			2. Persentase Laju Pertumbuhan Populasi Ternak	2. Mendorong peningkatan perbibitan dan produksi ternak	2. Mendorong penggunaan bibit ternak unggul dan berkualitas untuk mempercepat peningkatan produksi ternak dan mengupayakan ketersediaan bibit ternak unggul
				3. Memperluas wilayah IB baru dengan menyediakan sumberdaya dan parsarana IB baru	3. Melakukan upaya khusus untuk mempercepat peningkatan kualitas ternak dan menjamin ketersediaan pangan hewani yang cukup bagi Masyarakat
				4. Menyediakan pakan berkualitas baik dalam bentuk hijauan maupun konsentrat dan memberikan pelatihan – pelatihan pengolahan pakan yang berkualitas	4. Mendorong tumbuh kembangnya industri pakan ternak yang ramah lingkungan baik dalam skala kecil maupun besar
				5. Menerapkan sistem pelayanan Aktif, Semi aktif dan pasif serta menyediakan obat obatan ternak yang murah dan terjangkau bagi peternak	5. Mengoptimalkan peran dan fungsi tenaga teknis peternakan di lapangan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan peternakan dan kesehatan hewan
				6. Memberikan akses yang seluas - luasnya kepada para pelaku usaha bidang peternakan	6. Revalitalisasi sarana dan pararana peternakan terutama yang terkait

				untuk memanfaatkan fasilitas pemerintah	dengan pelayanan kepada masyarakat
				7. Memberikan kemudahan kepada masyarakat baik dalam hal penyederhanaan pelayanan tataniaga ternak, Informasi pasar dan pemanfaatan sarana dan prasarana pasar	7. Mendorong pengembangan komoditi peternakan yang berdaya saing dan mempunyai keunggulan komperatif
				8. Mengembangkan pola kemitraan usaha yang saling menguntungkan	8. Mendorong investasi melalui pola kemitraan usaha antara perusahaan inti dengan plasma (peternak) dan dukungan iklim usaha yang kondusif
				9. Pengelolaan administrasi Perkantoran, Sarana dan prasarana peternakan	9. Mengupayakan peningkatan kualitas manajemen pengelolaan sumberdaya aparat dan peningkatan kinerja pegawai



**BAB VI.**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN ANGGARAN**

Tabel 9. Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Anggaran Tahun 2024 - 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (out come) KEGIATAN (out put)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
					2024		2025		2026	
					Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Produksi dan produktivitas ternak	Meningkatnya Produksi Daging dan Telur	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				<b>24.306.737.132</b>		<b>24.831.762.654</b>		<b>25.368.128.731</b>
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>			<b>24.306.737.132</b>		<b>24.831.762.654</b>		<b>25.368.128.731</b>	
		<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>			<b>24.306.737.132</b>		<b>24.831.762.654</b>		<b>25.368.128.731</b>	
		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program	%	100	8.607.582.627	100	8.793.506.411	100	8.983.446.152
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	%	100	5.108.000	100	5.218.333	100	5.331.049
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	2.043.200	12	2.087.333	12	2.132.419
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	3.064.800	15	3.131.000	15	3.198.630
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana</b>	%	100	8.395.754.745	100	8.577.103.048	100	8.762.368.474
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	91	8.186.033.342	91	8.362.851.662	91	8.543.489.258
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	36	204.479.574	36	208.896.333	36	213.408.494
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	2.043.200	6	2.087.333	6	2.132.420
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	3.198.630	18	3.267.720	18	3.338.303
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah</b>	%	100	29.180.574	100	29.810.874	100	30.454.789
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	29.180.574	12	29.810.874	12	30.454.789
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	100	42.910.265	100	43.837.127	100	44.784.009
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	3.192.500	10	3.261.458	10	3.331.905		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	5.108.000	30	5.218.333	30	5.331.049		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	2.845.156	20	2.906.611	20	2.969.394		

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	150	5.113.108	150	5.223.551	150	5.336.380
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4	1.654.992	4	1.690.740	4	1.727.260
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	24.996.509	40	25.536.433	40	26.088.020
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>46.993.600</b>	<b>100</b>	<b>48.008.662</b>	<b>100</b>	<b>49.045.649</b>
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	26.561.600	10	27.135.331	10	27.721.454
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	20.432.000	10	20.873.331	10	21.324.195
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Jasa penunjang Urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>33.692.368</b>	<b>100</b>	<b>34.420.123</b>	<b>100</b>	<b>35.163.598</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.124.928	12	2.170.826	12	2.217.716
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	26.255.120	12	26.822.231	12	27.401.591
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5.312.320	12	5.427.066	12	5.544.291
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Intensitas Verifikasi Bansos	Laporan	0	-	0	-	0	-
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>53.943.075</b>	<b>100</b>	<b>55.108.245</b>	<b>100</b>	<b>56.298.584</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	50	38.619.075	50	39.453.247	50	40.305.437
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	15.324.000	2	15.654.998	2	15.993.146
	<b>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>Prosentase ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas</b>	<b>%</b>	<b>65</b>	<b>1.822.636.560</b>	<b>65</b>	<b>1.862.005.510</b>	<b>65</b>	<b>1.902.224.829</b>
	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Sumber Daya Genetik Hewan yang dipelihara di Lombok Timur</b>	<b>jenis</b>		<b>151.809.760</b>		<b>155.088.851</b>		<b>158.438.770</b>
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Laporan	10	141.593.760	10	144.652.185	10	147.776.672
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	10.216.000	1	10.436.666	1	10.662.098
	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Peternak yang menggunakan Teknologi Peternakan Tepat Guna</b>	<b>ternak</b>		<b>26.066.124</b>		<b>26.629.152</b>		<b>27.204.342</b>
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	12	26.066.124	12	26.629.152	12	27.204.342
	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penyediaan pakan ternak dan Registrasi ternak</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>1.644.760.676</b>		<b>1.680.287.507</b>		<b>1.716.581.717</b>

	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Laporan	3	1.624.344.000	3	1.659.429.830	3	1.695.273.515
	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	12	20.416.676	12	20.857.676	12	21.308.202
	<b>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana peternakan per tahun</b>	<b>%</b>	<b>1,5</b>	<b>183.275.040</b>	<b>1,5</b>	<b>187.233.781</b>	<b>1,5</b>	<b>191.278.031</b>
	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Prasarana Peternakan yang terbangun</b>	<b>Unit</b>		<b>183.275.040</b>		<b>187.233.781</b>		<b>191.278.031</b>
	Pembangunan, Rehabilitasi Pemeliharaan dan Operasional Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	1	49.036.800	1	50.095.995	1	51.178.068
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	134.238.240	4	137.137.786	4	140.099.962
	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Persentase terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dari PHM</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>13.693.242.906</b>	<b>100</b>	<b>13.989.016.953</b>	<b>100</b>	<b>14.291.179.719</b>
	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penurunan jumlah penyakit hewan dan zoonosis pertahun</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>	<b>9.960.600.000</b>	<b>5</b>	<b>10.175.748.960</b>	<b>5</b>	<b>10.395.545.138</b>
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	12	9.960.600.000	12	10.175.748.960	12	10.395.545.138
	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Intensitas pengawasan Pemasukan dan Pegeluaran ternak</b>	<b>Kali</b>	<b>167</b>	<b>449.603.606</b>	<b>167</b>	<b>459.315.044</b>	<b>167</b>	<b>469.236.249</b>
	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Laporan	12	449.603.606	12	459.315.044	12	469.236.249
	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengambilan sampel per populasi</b>	<b>Persen</b>	<b>1</b>	<b>2.615.066.140</b>	<b>1</b>	<b>2.671.551.569</b>	<b>1</b>	<b>2.729.257.083</b>
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	12	2.615.066.140	12	2.671.551.569	12	2.729.257.083
	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Jumlah Pelaku Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan</b>	<b>Orang</b>	<b>50</b>	<b>607.973.160</b>	<b>50</b>	<b>621.105.380</b>	<b>50</b>	<b>634.521.253,95</b>
	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit usaha	12	555.597.160	12	567.598.059	12	579.858.177
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	12	51.080.000	12	52.183.328	12	53.310.488
	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>	<b>Jumlah pemotongan ternak tercatat di RPH/TPH</b>	<b>ekor</b>	<b>36.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>36.000</b>	<b>61.296.000</b>	<b>36.000</b>	<b>62.619.994</b>
	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Unit	12	60.000.000	12	61.296.000	12	62.619.994
	<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>	<b>Jumlah Ijin Usaha Hewan yang direkomendasikan untuk Registrasi dan penerbitan ijin baru</b>	<b>Unit usaha</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>-</b>

		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Laporan	12	-	12	-	12	-
		Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan, Rumah Potong Hewan	Laporan	12	-	12	-	12	-
						<b>24.306.737.132</b>		<b>24.831.762.654</b>		<b>25.368.128.731</b>

**BAB VII.**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 – 2026**

**Tabel 10. Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lombok Timur Tahun 2024 – 2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formula	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Realisasi	Target		
							2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Produksi dan produktivitas ternak	Peningkatan Populasi Ternak (Unit Ternak)	$\sum$ <i>Populasi ternak tahun T berdasarkan hasil update data populasi ternak untuk semua jenis ternak yang dikonversi kedalam satuan unit ternak</i>				162.487	172.178	175.794	179.661
2				Meningkatnya Produksi Daging dan Telur	Peningkatan Produksi daging (ton)	<i>Populasi Ternak Tahun T x parameter rata2 berat karkas ternak dari populasi) /1000</i>	23.672,58	24.146,03	24.628,95	25.121,53
3					Peningkatan Produksi Telur (ton)	<i>Populasi Ternak Tahun T x parameter rata2 berat telur ternak dari populasi) /1000</i>	4.805,66	4.949,83	5.098,32	5.102,78

## **BAB VIII P E N U T U P**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 - 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026.

Pelaksanaan semua program dan kegiatan, baik dalam ”kerangka regulasi” maupun dalam ”kerangka anggaran” (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan antar OPD lainnya, dengan tetap memperhatikan tanggungjawab tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing OPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, difasilitasi melalui Forum OPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lombok Timur.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur selaku OPD teknis, diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan koordinatif dalam melaksanakan program dan kegiatan, untuk dapat mencapai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur sampai dengan Tahun 2026.

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur 2024 - 2026 merupakan pedoman bagi OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur dalam menyusun Program dan Kegiatan setiap tahunnya.

Selong, 2023

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Kabupaten Lombok Timur,



**Ir. H. MASYHUR, SP**  
NIP. 19661231 199203 1 150